TABLOID
SinarTani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)
www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id
www.sinartani.co.id

Edisi 2 - 8 Juli 2025
No. 4093
Tahun LV



8 Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy: Bangkitkan Kembali Riset dan Penyuluh Pertanian

9 Bisnis Matching Munas HKTI: Aroma Wangi Bisnis Atsiri, Siapa Penikmatnya?

11 Brigade Pangan Sajau Rasakan Gaji Dua Digit



AKHIR DUALISME HKTI

www.tabloidsinartani.com tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV



EDITORIAL

SATU HKTI, SATU HATI

Setelah mengalami perpecahan dan terjadi dua kubu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akhirnya bersatu kembali. Kubu HKTI Fadli Zon dan Moeldoko sepakat bergandeng tangan dan memilih Soedaryono yang menjabat Wakil Menteri Pertanian menjadi Ketua Umum DPN HKTI periode 2025-2030.

HKTI kubu Fadli Zon menggelar Musyawarah Nasional (Munas) X pada Rabu (25/6) di Gedung Kementerian Pertanian. Pada pembukaan Munas, hadir Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy. Saat Munas, anggota HKTI dari berbagai wilayah Indonesia sepakat menunjuk Sudaryono sebagai pengganti Fadli Zon.

Sehari kemudian pada Kamis (26/6), HKTI kubu Moeldoko juga menyelenggarakan Munas di Hotel Sulthan yang secara aklamasi menyerahkan kepemimpinan ke Sudaryono juga. Saat pembukaan Munas, hadir Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI Oesman Sapta Odang (OSO). Saat itu Moeldoko pun menyerahkan estatef kepemimpinan ke Sudaryono sebagai penerusnya.

Sebagai organisasi yang berdiri sejak 1973 dan menjadi wadah perjuangan petani Indonesia, HKTI memang telah menghadapi berbagai dinamika internal. Pada Munas VII di Bali Juli 2010, HKTI sempat mengalami dinamika internal berupa dualisme kepengurusan antara kepemimpinan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Fadli Zon yang berlangsung lebih dari satu dekade.

Konflik ini tidak hanya memecah belah organisasi, tapi juga melemahkan peran HKTI sebagai mitra strategis pemerintah dalam memajukan kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan pangan nasional. Kini, kedua kubu yang berselisih baik dari Fadli Zon dan Moeldoko sepakat tak ada lagi dualisme dengan menunjuk Sudaryono sebagai sosok yang memimpin HKTI.

Satu harapan, penyatuan HKTI akan memperkuat akselerasi pembangunan sektor pertanian nasional. Munas ke-X kali ini menjadi momentum bersejarah untuk menyatukan kembali kedua kekuatan tersebut dalam satu kepemimpinan tunggal demi kemajuan petani dan pembangunan pertanian Indonesia.

Bersatunya dua HKTI ini menjadi babak baru. Masing-masing HKTI tak ada lagi bayang-bayang perpecahan. HKTI Bersatu ini, memang bukan hanya secara organisasi, tapi juga menyatu secara jiwa dan semangat.

Meski HKTI sudah bersatu, namun tantangan bagi HKTI tak ringan. Membawa masing-masing pengurus kedua HKTI dan berbagai kepentingan lain ke dalam satu irama bukanlah tugas sepele. Namun di sisi lain, semangat memperjuangkan petani harus menjadi landasan utama.

Apalagi Presiden Prabowo Subianto juga telah berpesan agar HKTI kembali solid dan fokus pada nasib petani. Dengan potensi 76 juta petani, Indonesia mempunyai kekuatan rakyat yang harus dikelola dengan baik. Artinya, HKTI tidak lagi bermain ditataran elit politisi, tapi juga harus kembali turun ke desa. Dengar suara petani dan menjawab kebutuhan mereka secara nyata. Bukan rahasia lagi, pekerjaan rumah (PR) petani Indonesia masih sangat banyak.

SAUNG TANI

Dua kubu HKTI akhirnya bersatu
- bersatu kita teguh, berdua saling tuduh

Mentan ungkap ada 212 merek beras tak sesuai regulasi
- Angka wiro sableng

Hari Krida Pertanian, jadi momen transformasi penyuluh
- Semoga jauh lebih baik

MENYAPA



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Selamat Hari Krida Pertanian

Hari Krida Pertanian ke-53 menjadi momen transformasi penyuluh pertanian. Apalagi Presiden melalui Inpres No. 3 Tahun 2025 akan menarik penyuluh pertanian di daerah ke pusat. Kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di seluruh Indonesia.

Peringatan ini sekaligus menjadi momentum penting bagi seluruh insan pertanian untuk merayakan capaian besar sektor pertanian yang tidak lepas dari kontribusi dari para penyuluh dilapangan. Saat ini Indonesia mempunyai stok beras tertinggi dalam 57 tahun terakhir, yakni 4,2 juta ton.

Kami ucapkan terima kasih kepada penyuluh pertanian. Ini adalah tonggak sejarah Republik Indonesia. Ini adalah capaian luar biasa hasil kerja keras kita semua. Capaian ini tak hanya diakui secara nasional, namun juga mendapat pengakuan dari lembaga internasional. Data dari USDA (United States Department of Agriculture) mencatat produksi padi Indonesia mencapai 34,6 juta ton, melebihi target 32 juta ton.

Sementara FAO juga mengestimasi produksi padi Indonesia berada di kisaran 35,6 juta ton lebih, menunjukkan kepercayaan global terhadap kinerja pertanian Indonesia. Kita baru baru ini sewa gudang dengan 1,2 juta ton kapasitas dan sekarang sudah full lagi. Bahkan saat ini, jagung kita sulit terserap karena stok yang begitu tinggi. Tapi pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk menyerapnya. Ini semua berkat kerja keras lapangan Bapak-Ibu PPL dan petani.

Saudaraku sahabatku semua, Kalau mau Indonesia menjadi lumbung pangan, kita harus luruskan dan bereskan mafia yang bergerak sektor pangan. Tidak boleh kita biarkan. Aku tahu ini responnya besar. Kami telah melakukan survei investigasi dan menemukan, penjualan beras di atas HET. Kami sudah dicek ada anomali harga beras yang menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp 99 triliun.

Kerugian terjadi beras premium, tapi isinya adalah beras medium. Begitu juga beras medium, tapi isinya beras curah. Anomali juga terjadi, karena harga turun di tingkat penggilingan dan petani, tapi harga di konsumen naik. Semua itu, harus kita luruskan dan tidak boleh dibiarkan.

Dengan harga beras yang cukup stabil saat ini, artinya mulai petani, penyuluh, kepala dinas sampai pusat telah berkontribusi menekan harga pangan dunia. Kenapa? Karena Indonesia tidak impor yang mana dua tahun berturut-turut kita masih mengimpor beras hingga 7 juta ton. Jadi petani dan penyuluh pertanian sudah berjasa, kalian adalah pahlawan. Bapak Presiden menyampaikan terima kasih kepada petani dan penyuluh pertanian.

Pada peringatan hari Krida Pertanian ke 53 ini, kami juga mengapresiasi keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian, termasuk dalam reformasi distribusi pupuk subsidi yang kini dipermudah. Dulu pupuk harus muter ke 12 kementerian, harus ada tanda tangan dari 38 gubernur, 500 bupati/wali kota. Sekarang dari Menteri Pertanian langsung ke petani. Ini keberpihakan nyata dari Presiden.

Penyuluh pertanian menjadi ujung tombak pertanian nasional. Kalian adalah "mata dan telinga" Presiden RI dan Kementerian Pertanian di lapangan. Saya titip kepada penyuluh pertanian, laporkan kalau ada penyimpangan. Saya ingin sampaikan kepada seluruh PPL Indonesia, saya cinta kalian.

PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Herman EP.

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter**: Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris Utama: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586; **Percetakan:** PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Yuk Suburkan Tanah, **Demi Anak Cucu**



Yuk, jaga kesuburan tanah kita sekarang! Agar anak cucu kelak bisa menikmati panen melimpah dan bumi tetap lestari untuk masa depan yang cerah dan penuh harapan.

Bicara soal swasembada pangan tak bisa lepas dari satu komponen paling dasar: tanah yang subur. Sebab, sebagaimana air bagi kehidupan, tanah yang sehat adalah pangkal dari segala bentuk keberlanjutan. Sayangnya, kondisi tanah pertanian di Indonesia, termasuk di sentra-sentra produksi pangan semakin hari justru kian memprihatinkan.

Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga tanah pertanian kita bereaksi masam, dengan pH di bawah 5.5. Artinya, tanah tersebut tidak hanya tidak optimal mendukung pertumbuhan tanaman, tetapi juga membatasi efektivitas pupuk yang diberikan. Di tanah masam, unsur hara penting seperti nitrogen (N), kalium (K), dan fosfor (P) mudah tercuci atau terfiksasi, sehingga menjadi tidak tersedia bagi tanaman.

Tak hanya itu, kadar karbon organik dan hara makro seperti kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) juga tergolong rendah sampai sangat rendah. Kondisi ini diperparah oleh penggunaan alat berat secara terus-menerus yang memadatkan tanah, dan minimnya sistem pengairan yang memadai, terutama di musim kemarau. Di lahan rawa, sebaliknya, air terlalu berlimpah dan menggantikan ruang udara di pori-pori tanah. Akibatnya, akar tanaman kesulitan bernapas dan akhirnya mati.

Ciri Tanah Subur

Secara sederhana, tanah subur adalah tanah yang mampu menunjang kehidupan. Tak hanya bagi tanaman, tetapi juga bagi organisme lain seperti mikroba tanah. Dalam satu genggam tanah sehat, hidup jutaan mikroba yang bekerja tanpa henti untuk membantu tanaman menyerap unsur hara. Mereka seperti tukang masak yang menyiapkan nutrisi agar tanaman bisa tumbuh maksimal.

Ciri tanah subur bisa dilihat dari empat indikator utama:

1. Ketersediaan oksigen dan air dalam komposisi seimbang
2. pH tanah yang netral (5.5 – 6.5) serta kecukupan karbon dan nutrisi
3. Populasi mikroba tanah yang aktif
4. Bebas dari pathogen dan zat toksik

Bila keempat indikator ini bisa dipenuhi, maka bisa dipastikan tanah tersebut akan memberikan hasil panen yang melimpah dan sehat.

Kaya Mikroba, Bebas Racun

Mikroba tanah memiliki peran vital dalam mengubah unsur hara menjadi bentuk yang mudah diserap akar. Mereka menambat nitrogen dari udara, melarutkan fosfat, dan mendekomposisi bahan organik menjadi unsur penting seperti N, P, K, dan lainnya. Mereka juga menghasilkan asam organik yang membantu menjaga struktur tanah tetap gembur.

Namun, mikroba hanya bisa bekerja optimal bila kondisi tanah mendukung. Udara dan air dalam pori-pori tanah harus seimbang, suhu dan kelembaban harus stabil, dan tanah tidak mengandung logam berat atau residu pestisida yang meracuni kehidupan mereka.

Tanah yang baik juga harus bebas dari pathogen penyebab penyakit tanaman. Organisme seperti fusarium, xanthomonas, dan nematoda bisa menghancurkan pertanian hanya dalam waktu singkat. Tak kalah berbahaya, tanah juga bisa tercemar oleh limbah industri dan sisa pestisida kimia yang bersifat toksik jangka panjang, terutama kelompok organoklorin.

Oleh karena itu, pemantauan dan pengendalian mutu tanah harus menjadi bagian dari program pertanian berkelanjutan. Jika pencemaran sudah terjadi, maka pendekatan fitoremediasi, bioremediasi, dan kemoremediasi bisa diterapkan sebagai langkah penyelamatan.

Cara Menyuburkan Tanah

Menyuburkan tanah bukan pekerjaan semalam. Ia butuh kesabaran, ketekunan, dan keterlibatan banyak pihak. Namun, langkah-langkah awal bisa segera dilakukan.

Berikut ini adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan petani dan pemerintah daerah:

1. Pengapuran

Untuk memperbaiki reaksi tanah yang masam, kapur dolomit sangat disarankan. Selain menetralkan pH, kapur ini juga menyuplai unsur kalsium dan magnesium yang penting bagi tanaman

2. Pemberian Pupuk Organik dan Pembenah Tanah

Kompos, pupuk kandang, biochar, zeolite, dan bahan pembenah lainnya dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK), serta menyediakan karbon organik sebagai "makanan" mikroba tanah.

3. Pemupukan Berimbang

Menggunakan NPK sesuai kebutuhan tanaman dan jenis tanah sangat penting. Pemupukan berimbang memastikan bahwa tidak ada unsur hara yang berlebihan maupun kekurangan.

4. Pengelolaan Air yang Baik

Di lahan kering, pengairan sangat penting. Sebaliknya di lahan basah, sistem drainase harus dijaga agar air tidak menggenangi tanaman terlalu lama. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang "nyaman" bagi akar dan mikroba.

5. Rotasi Tanam dan Pola Tanam Sehat

Menghindari monoculture yang panjang dan menerapkan rotasi dengan tanaman berbeda akan mengurangi akumulasi penyakit tanah dan menjaga keseimbangan hara.

6. Pemanfaatan Musuh Alami dan Agensia Hayati

Untuk mengendalikan pathogen tanah, petani dapat menggunakan musuh alami atau biofungisida berbasis mikroba. Ini adalah pendekatan agroekologis yang semakin diminati karena ramah lingkungan.

Karenya, pola tanam dan pemanfaatan musuh alami sangat penting dalam mengendalikan pathogen tanah, seperti fusarium, xanthomonas, nematode, dan lain-lain.

Sementara itu pengendalian tanah tercemar bahan toksik bisa menggunakan pendekatan fitoremediasi, kemoremediasi, bioremediasi, atau kombinasi dari cara-cara tersebut.

Penulis : Dedi Nursyamsi, I. Sariati, dan A. Susilawati
Penyuluh Pertanian Pusat

Peringatan Keras Industri Teh Dunia

CATATAN Begawan



Sebuah studi internasional penting yang diterbitkan Environmental and Sustainability Indicators (Mei 2025) mengeluarkan peringatan keras. Perubahan iklim akan mengubah kontur industri teh global secara signifikan pada pertengahan abad ini.

Penelitian yang dilakukan ilmuwan dari Assam University di India, University of Wisconsin, dan Addis Ababa University menguraikan bagaimana zona penanaman teh tradisional akan bergeser, menyusut, atau, dalam beberapa kasus, meluas seiring meningkatnya suhu global dan berubahnya pola cuaca.

Pada tahun 2050, diprediksi lebih dari separuh dari 20 negara produsen teh teratas dunia diproyeksikan akan mengalami penurunan signifikan dalam ketersediaan lahan yang sangat cocok untuk budidaya teh. Kenya, salah satu eksportir teh hitam terkemuka, dapat kehilangan hingga 26,2% dari zona penanaman teh optimalnya, dengan kesesuaian rata-rata turun sebanyak 39%.

Di India, gambarannya lebih bervariasi. Beberapa model memperkirakan sedikit penurunan lebih dari 2% di area yang sangat sesuai. Sementara yang lain menunjukkan peningkatan, terutama di dataran tinggi dan berpotensi terjadi pergeseran lereng ke atas.

Sri Lanka, pemain utama lainnya, mungkin mengalami penurunan sebesar 14% di area optimal pada tahun 2050, dan memburuk hingga hampir 30% pada tahun 2070. Begitu juga Tiongkok pun tidak kebal perubahan iklim, dengan proyeksi yang menunjukkan penurunan sebesar 4,7% di zona-zona penghasil teh papan atas. Bahkan dapat meningkat jika terjadi skenario iklim yang lebih parah.

Temuan-temuan ini menggarisbawahi kerentanan yang semakin meningkat di daerah penghasil teh dunia. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendesak tentang keberlanjutan jangka panjang rantai pasokan yang bergantung pada petani kecil. Potensi hilangnya lahan utama dapat secara langsung memengaruhi pendapatan petani, kualitas panen, dan ketersediaan teh global. Hal ini menjadi tantangan yang menuntut strategi adaptasi yang proaktif.

Perubahan iklim juga menghadirkan peluang baru. Beberapa negara diharapkan memperoleh keuntungan dari perubahan kondisi pertumbuhan. Turki, misalnya, dapat mengalami peningkatan dramatis sebesar 127-130% pada lahan penanaman teh yang cukup sesuai pada tahun 2050, khususnya di daerah yang lebih tinggi dan lebih dingin.

Negara-negara lain seperti Iran, Rwanda, dan Thailand diproyeksikan memperoleh peningkatan antara 11% dan 27% di zona penanaman teh yang sangat sesuai, yang berpotensi muncul sebagai pusat produksi teh baru.

Para peneliti menekankan urgensi adaptasi yakni investasi dalam infrastruktur seperti irigasi dan transportasi di wilayah berkembang, pengembangan kultivar yang tahan terhadap iklim, promosi praktik agroforestri dan konservasi tanah. Selain itu, penggunaan alat perencanaan yang kuat dan berbasis data untuk memandu keputusan zonasi dan penggunaan lahan. ***(Sumber: STIR Tea and Coffee magazine)***

AKHIR DUALISME HKTI



Musyawarah Nasional (Munas) X HKTI akhirnya menetapkan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025-2030 menggantikan Fadli Zon. Sementara itu kubu HKTI Moeldoko juga secara aklamasi menyerahkan kepemimpinan ke Sudaryono juga.

HKTI, organisasi yang berdiri sejak 1973 sebagai wadah perjuangan petani Indonesia, telah menghadapi berbagai dinamika internal. Sejak Munas VII di Bali Juli 2010, HKTI sempat mengalami dinamika internal berupa dualisme kepengurusan antara kepemimpinan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Fadli Zon yang berlangsung lebih dari satu dekade.

Konflik ini tidak hanya memecah belah organisasi, tapi juga melemahkan peran HKTI sebagai mitra strategis pemerintah dalam memajukan kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan pangan nasional. Kini, kedua kubu yang berselisih baik dari Fadli Zon dan Moeldoko sepakat tak ada lagi dualisme dengan menunjuk Sudaryono sebagai sosok yang pemimpin HKTI.

Satu harapan, penyatuan HKTI akan memperkuat akselerasi pembangunan sektor pertanian nasional. Munas ke-X kali ini menjadi momentum bersejarah untuk menyatukan kembali kedua kekuatan tersebut dalam satu kepemimpinan tunggal demi kemajuan petani dan pembangunan pertanian Indonesia.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menilai, penyatuan dua kubu dalam tubuh HKTI menjadi satu kekuatan nasional dipandang sebagai langkah tepat untuk memperkuat konsolidasi kelembagaan petani. Dengan struktur yang lebih solid, HKTI diyakini mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pencapaian berbagai program pembangunan pertanian, termasuk swasembada pangan.

“Ini adalah momentum yang baik untuk menyatukan HKTI yang selama ini terbelah, menjadi satu kekuatan besar. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama merealisasikan visi Presiden Prabowo, khususnya di sektor pertanian,” ujar Mentan Amran saat menghadiri Munas ke-10 HKTI di Kementan, Jakarta, Selasa (24/6).

Amran juga mengapresiasi semangat dan kekompakan para peserta Munas HKTI, yang datang dari 35 provinsi secara sukarela dalam waktu yang singkat. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa HKTI memiliki kekuatan besar dan komitmen tinggi untuk membangun pertanian nasional yang maju dan berkelanjutan.

Amran juga menekankan pentingnya penguatan peran HKTI di setiap wilayah dalam mengawal pengembangan komoditas unggulan daerah berbasis keunggulan komparatif. Bukan hanya itu, ia mengingatkan, untuk menyatukan HKTI dalam masa transisi ini, diperlukan struktur yang fleksibel.

“Yang penting inklusif, terbuka, dan bisa menjaring sebanyak mungkin energi positif. Penyaringan akan terjadi secara alamiah, yang sungguh-sungguh pasti akan tetap tinggal,” ucap Amran dengan nada optimis.

Dalam Munas HKTI dan Kongres Tani Indonesia yang berlangsung di Kementerian Pertanian, Jakarta, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang terpilih menjadi Ketua Umum HKTI menegaskan komitmennya menyatukan dualisme yang telah lama memecah organisasi petani tersebut.

Sudaryono yang dipilih secara aklamasi pada 25 Juni 2025, mengapresiasi kepercayaan dari dua kepengurusan antara kepemimpinan Moeldoko dan Fadli Zon. “Di penyelenggaraan Munas kali ini, HKTI yang diketuai Pak Fadli Zon dan juga HKTI yang diketuai Pak Moeldoko akan ada persatuan, akan bersatu menjadi satu HKTI, tidak lagi ada dualisme di situ," ujarnya.

Tak Lagi Jalan Sendiri

Bahkan Sudaryono juga menganggap, bersatunya HKTI ini menjadi tonggak bagaimana yang tadinya jalan sendiri-sendiri ini bisa bersatu, bersatu di pusat, dan bersatu sampai dengan level di bawah, di provinsi, kabupaten, sampai dengan kecamatan dan seterusnya.

Sebagai sosok yang lahir dan besar dari keluarga petani, Sudaryono mengapresiasi kepercayaan dari berbagai kalangan tersebut. Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus memajukan sektor pertanian nasional serta mewujudkan swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Insyaallah, itu satu kepercayaan, dan orang percaya karena punya harapan. Ya kita lakukan yang terbaik. Semoga itu bisa memenuhi harapan dari semua orang yang trust dan percaya. Sebagai seorang muslim tentunya jabatannya ini, saya sikapi dengan Innalilahi wainnailaihi rojiun. Segala sesuatu nya milik Allah dan akan kembali kepada Allah," tuturnya.

Sudaryono mengungkapkan amanah sebagai Ketua Umum HKTI adalah sarana untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat petani dan negara. Kesejahteraan petani menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

”Ini akses manfaat bagaimana memberikan manfaat yang besar ke petani dan negara. Kalau petani *happy*, produktivitasnya tinggi, petani sejahtera, sementara produktivitas tinggi kan, negara juga senang karena kita punya cadangan pangan yang cukup, tidak perlu impor, ekonomi bergerak, dan seterusnya,” tuturnya.

Untuk itu, ia menegaskan jalan pertama yang harus ditempuh oleh seluruh pengurus HKTI adalah menyatukan visa tanpa melihat lagi yang pernah terjadi masa lalu. “Saya mengajak seluruh jajaran HKTI, baik di DPN, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, maupun di daerah, untuk bersatu dan memiliki peran aktif. Kita harus punya visi bersama, menjalankan, dan mengeksekusi program demi kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan nasional,” tegasnya.

HKTI Kubu Moeldoko

Sementara itu Ketua Umum HKTI kubu Jenderal TNI (Purn) Moeldoko secara resmi juga menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Sudaryono dalam Musyawarah Nasional (Munas) X HKTI yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (26/6).

Dalam forum yang juga dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI Oesman Sapta Odang (OSO), Moeldoko menyampaikan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) HKTI yang memutuskan Sudaryono sebagai penerusnya. “Di dalam Rapim, kita telah memilih dan mempercayakan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, untuk memimpin HKTI ke depan,” ujar Moeldoko.

Moeldoko menegaskan dengan keputusan ini, babak baru HKTI telah dimulai, tanpa bayang-bayang perpecahan. "Mulai saat ini, HKTI hanya satu. Tidak ada lagi dualisme," ujarnya lantang seraya mengajak semua kader untuk kembali fokus pada perjuangan hak-hak petani, bukan lagi sibuk dengan perbedaan yang sudah lewat.

“Saya sudah dipercaya Pak OSO memimpin selama 10 tahun. Tapi rasanya, kita terlalu lama berkutat pada hal-hal yang membuat kita jalan di tempat,” lanjut mantan Panglima TNI itu. “Kini waktunya bersatu, bukan cuma secara organisasi, tapi juga menyatu secara jiwa dan semangat.”

Gsh/Yul

Saatnya HKTI Bertransformasi

HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) harus menjadi organisasi modern yang kerja nyata, bukan sekadar banyak omong. Begitu penegasan Ketua Umum DPN HKTI terpilih Sudaryono.



Dalam suasana Munas HKTI yang meriah dan dipenuhi rasa optimisme, Sudaryono, menyampaikan pidato penuh semangat dan guyon segar, namun sarat makna dan arahan tajam. Ia bukan hanya sekadar menyapa, tetapi juga menantang seluruh pengurus dan kader HKTI untuk menjadi pejuang lapangan yang bergerak cepat, bukan tukang wacana yang hanya pintar bicara.

"Karena itu, saya berharap HKTI jadi organisasi modern yang bekerja. Jangan banyak omon-omon," tegas Sudaryono. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Sudaryono yang juga Wakil Menteri Pertanian ini melihat tantangan pertanian Indonesia ke depan makin kompleks.

Karena itu, menurutnya, HKTI harus bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang tersambung dengan program pemerintah, bukan lagi sekadar pengamat atau pengkritik pasif. Baginya, organisasi hidup itu bukan di seminar dan diskusi belaka. Ia ingin HKTI punya denyut nadi di tengah rakyat, aktif menyapa petani, bukan sekadar menyusun program lalu bubar.

Sudaryono menegaskan, HKTI sejak awal berdirinya adalah mitra pemerintah, bahkan sudah demikian sejak masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Namun pasca reformasi, arah HKTI cenderung tidak sejalan dengan kebijakan negara. Perannya pun banyak berpindah menjadi lembaga advokasi petani.

"Itu bagus, tapi sekarang bukan waktunya hanya advokasi. Kita harus membela langsung, menghubungkan petani dengan kebijakan, dengan program nyata dari pemerintah," katanya. Karena itu, Ia ingin HKTI terkoneksi langsung dengan strategi besar pertanian nasional.

Sebagai Wakil Menteri Pertanian, ia merasa memiliki tanggung jawab ganda. Selain, membangun pertanian lewat kebijakan, dan menghidupkan HKTI sebagai perpanjangan tangan program. "Sekarang saya punya tambahan pasukan: penyuluh pertanian, dinas, Babinsa, dan sekarang HKTI. Tinggal pilih, mau pasukan yang kerja atau cuma tidur?".

Sudaryono juga menginginkan HKTI menjadi pasukan tambahan yang bukan cuma hadir di forum, tapi bekerja nyata di desa dan sawah. Karena itu, ke depan dirinya akan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi ketat. Pengurus provinsi harus menjadi mandor dari kinerja kabupaten, dan hasilnya harus bisa diukur.

Menyampaikan perumpamaan soal karakter bangsa dari kebiasaan kerjanya, Sudaryono mengungkapkan, Jepang disebut sebagai bangsa yang banyak kerja sedikit bicara. Jerman bahkan lebih ekstrem, kerja terus, hampir tak banyak omong. China, katanya, bisa kerja dan bicara sekaligus, makanya bisa bangkit cepat.

"Ada juga bangsa yang banyak bicara, sedikit kerja. Itu katanya sih di Afrika, kata orang-orang ya. Nah Indonesia masuk kategori yang mana?" ujarnya. Pertanyaan retoris itu menyenggol sekaligus mengajak refleksi. Sudaryono menginginkan Indonesia, khususnya HKTI, masuk golongan bangsa yang produktif, yang menjawab tantangan bukan dengan debat, melainkan aksi.

Langkah Kongkret

Sebagai langkah konkret, Sudaryono melempar tantangan ke seluruh pengurus HKTI: adakan minimal dua kegiatan nyata di tingkat kabupaten selama Juli. "Apa pun itu, asal berdampak untuk petani dan rakyat, silakan. Asal jangan cuma acara seremoni," tegasnya.

Menurutnya, sebuah organisasi bisa hidup karena pertemuan dan kegiatan. Tanpa itu, organisasi cuma tinggal papan nama. Contohnya, acara Munas kali ini dianggapnya paling mewah sepanjang sejarah HKTI, baik dari segi kemasan maupun dukungan sponsor. Tapi, kemewahan itu harus dibayar dengan kerja keras setelahnya.

Sudaryono juga dengan lugas mengatakan bahwa HKTI di bawah kepemimpinannya tidak akan menjadi tempat nyaman bagi mereka yang suka leha-leha. "Saya orang kerja. Hobi saya cuma tiga, makan, tidur, dan kerja. Jadi kalau ada yang tidak suka kerja, ini akan jadi organisasi yang tidak enak buat kalian," ucapnya setengah serius.

Namun bagi mereka yang mau belajar, mau berkeringat, Sudaryono pun menjamin akan menjadi perjalanan menyenangkan, penuh tantangan dan kontribusi. Ia pun mengajak seluruh jajaran HKTI untuk mewujudkan organisasi modern yang bukan hanya terdengar, tapi juga terasa oleh para petani di pelosok negeri.

Ia mendorong semua elemen, termasuk HKTI, untuk berperan aktif dalam menyukseskan agenda pertanian nasional. Menurutnya, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana sektor pertanian dikelola sejak hari ini.

Karena itu, Sudaryono menyambut baik bersatunya dua kubu dalam tubuh HKTI. Ia menilai, ini menjadi peluang besar untuk memperkuat peran petani dalam pembangunan. "HKTI sekarang tidak bisa lagi pasif. Harus jadi bagian dari program pemerintah. Harus aktif, bahkan kalau perlu, harus kritis," katanya.

Ia berharap HKTI mampu menjadi organisasi yang produktif. Tidak hanya hadir saat munas, tapi juga hadir di lapangan. Ia mendorong agar HKTI mulai menghasilkan benih sendiri, pupuk organik sendiri, dan menjadi mitra strategis pemerintah. "Kalau dulu HKTI bisa bertahan di masa sulit, masa sekarang tidak bisa lebih baik? Ini saatnya HKTI menunjukkan kapasitas," serunya.

Sudaryono menutup pidatonya dengan nada reflektif, bahwa rakyat Indonesia, khususnya petani, tidak butuh janji-janji kosong. Mereka perlu kehadiran, perhatian, dan pendampingan yang nyata. "Bagi saya, yang penting bukan bikin program, tapi apakah program itu sampai ke petani? Apakah HKTI hadir saat petani butuh solusi? Itulah yang harus jadi ukuran," ujarnya penuh penekanan. **Gsh/Yul**

Desa Kunci Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan akan menentukan ketahanan negara atau bangsa. Di tengah krisis global, desa menjadi benteng terakhir dalam menjaga ketahanan bangsa. Di desalah tempat pertumbuhan produksi pangan.



Dalam kehidupan, pangan, air dan energi menjadi hal yang sangat penting. Ketiganya menjadi hal yang kini mendapat perhatian dunia. Seperti yang terjadi saat ini, dunia tengah menghadapi tantangan serius berupa kelangkaan energi, krisis air, dan ancaman ketahanan pangan. Di sisi lain jumlah penduduk dunia terus meningkat.

Misalnya energi, dunia memperkirakan tahun 2050 energi fosil akan habis, sehingga akan beralih ke bio energi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduknya, membuat pemimpin negara-negara dunia mencari sumber penghidupan.

"Kalau kita lihat, perang hari ini bukan lagi soal ideologi atau politik semata, tapi perang untuk mempertahankan hidup. Perang karena energi, air, dan pangan. Negara-negara yang tak punya cukup sumber daya akan bergerak ke selatan. Indonesia berada di garis depan, negara ekuator yang subur dan luas," tutur Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria.

Riza mengungkapkan, negara-negara di belahan bumi utara diprediksi akan bergerak menuju wilayah selatan dan negara-negara ekuator untuk mencari sumber kehidupan. Diperkirakan ada 9,5 miliar penduduk dari negara non ekuator yang akan mencari kehidupan ke negara ekuator atau negara yang berada di katulistiwa yang merupakan negara-negara subur.

"Bagaimana hubungan dengan Indonesia? Kita adalah negara yang berada di khatulistiwa, negara yang subur. Ini menjadi tantangan kita," kata Riza saat Sarasehan Tani dalam Musyawarah Nasional (Munas) X Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, Selasa (24/6),

Salah satu potensi besar yang Indonesia miliki adalah sumberdaya alam yang tidak semua negara di dunia miliki. Sebagai upaya memastikan masyarakat mendapatkan sumber pangan, Pemerintah Indonesia memperkuat sektor pertanian yang umumnya berada di perdesaan.

Saat ini kata Riza, Indonesia memiliki 75.266 desa. Namun menurut data Kementerian Desa, sebanyak 4.363 desa masih tergolong sangat tertinggal, dan 6.100 desa termasuk desa tertinggal. Ada sekitar 24.532 desa berkembang dan 17.203 desa mandiri. "Memang masih ada 14 persen desa tertinggal yang mayoritas berada di kawasan timur Indonesia, khususnya Papua dan Maluku," katanya.

Selain itu, ada 3.246 desa yang belum mendapatkan aliran listrik dan masih ada 22.544 lebih desa yang sulit mengakses internet dan masih ada 13 juta orang penduduk desa yang miskin di pedesaan. "Ini realitas desa kita hari ini dan menjadi tantangan. Masih banyak desa yang jauh tertinggal atau sangat tertinggal, padahal potensi sumber daya alamnya sangat luar biasa. Ini harus jadi perhatian kita bersama," kata Riza.

Sejak berlakunya Undang-Undang Desa, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana desa senilai total Rp 681 triliun. Setiap desa dialokasi tahunan antara Rp 400 juta hingga Rp 1,5 miliar. Namun umumnya setiap desa mendapatkan sekitar Rp 800 juta per tahun.

Melalui musyarawah desa, Kata Riza, dana ini untuk pembangunan berbagai fasilitas desa, seperti jalan desa, jembatan, pasar, irigasi, embung, MCK, dan sarana kesehatan. Diharapkan dana tersebut dapat meningkatkan ekonomi dan kualitas desa.

"Alhamdulillah, dana desa ini sudah banyak membantu pembangunan infrastruktur dasar. Tapi infrastruktur saja tidak cukup. Kita ingin desa yang sangat tertinggal semua harus menjadi desa yang berkembang maju dan mandiri. Kita perlu membangun ekonomi desa agar masyarakat sejahtera dan mandiri," tambahnya.

Desa Mandiri, Desa Ekspor

Saat ini potensi desa di seluruh Indonesia tidak kurang 75.260 desa. Dengan perincian potensi perkebunan ada sekitar 20.034 atau 26,8 persen, desa potensi perikanan 12.827 (17,1 persen) potensi perikanan, potensi desa wisata 7.275 desa (2,5 persen), potensi energi terbarukan sekitar 64.587 desa.

Dari jumlah desa yang ada, ada lebih dari 1,5 juta unit BUM Desa Koperasi UMKM dan usaha-usaha masyarakat. Dari BUMDES tersebut, pemerintah juga menyiapkan aksi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dari BUMDes. "Ada rencana peningkatan ketahanan pangan lokal desa dengan pengembangan desa ekspor," katanya.

Pemerintah kini mendorong program Desa Mandiri dan Desa Ekspor sebagai strategi baru dalam meningkatkan ekonomi perdesaan. Salah satu contoh sukses adalah desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang berhasil mengekspor gula kelapa ke Eropa dan Australia melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Saya terkejut, 90 persen produksi gula kelapa dunia itu dari Indonesia, dan 80 persennya dari Jawa Tengah, khususnya Banyumas. Tapi ekspornya masih bentuk curah, bukan kemasan siap pakai. Kalau kita bisa ekspor dalam bentuk *sachet* atau produk akhir, nilai tambahnya bisa jauh lebih tinggi," tutur Riza.

Ia juga mengkritisi masih maraknya ekspor kelapa gelondongan ke luar negeri, terutama ke Tiongkok, tanpa pengolahan di dalam negeri. "Kalau Malaysia saja berhenti ekspor gula kelapa karena tahu kelapa lebih bernilai diolah jadi produk lain, kita juga harus berpikir demikian. Jangan bangga ekspor mentah. Kita harus jadi penentu harga, bukan hanya pemasok," ungkapnya.

Untuk menjawab keterbatasan dana dan sumber daya pemerintah, Wamendes memperkenalkan program kolaboratif bernama OKTAHELIX. Karena itu, Riza mengingatkan, semua stakeholder harus bertanggung jawab terhadap desa.

"Umpamanya nanti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan program masing-masing, tapi kita akan jadikan setiap stakeholder bertanggung jawab terhadap desa. Contoh organisasi HKTI bisa putuskan desa mana yang ingin dibangun," ujarnya.

Riza menegaskan semua pejabat punya tanggung jawab membangun minimal satu desa. "Enggak usah banyak-banyak, desa asalnya, desa orang tuanya, atau desa tempat tinggalnya," ucapnya.

Pemerintah juga tengah menyiapkan *super apps* yang memungkinkan setiap orang melihat potensi dan permasalahan desa secara digital dan transparan. Untuk itu, Riza mengajak generasi muda untuk tidak ragu memulai karier kepemimpinan dari tingkat desa.

Menurutnya, kepala desa memiliki kewenangan seperti "presiden mini" yang memimpin wilayah dengan penduduk, anggaran, dan masalah nyata. "Jangan langsung mimpi jadi gubernur atau presiden. Mulailah dari kepala desa. Di sana ada anggaran, ada masyarakat, ada pembangunan nyata. Ini ladang latihan kepemimpinan yang sesungguhnya," ujarnya.

Wamendes menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Indonesia akan mencapai target nol desa tertinggal dalam lima tahun ke depan. "Visi Pak Prabowo soal pangan, air, dan energi bukan sekadar slogan. Ini visi yang akan menyelamatkan bangsa. Dan semuanya bermula dari desa," kata Riza. **Herman/Yul**



Koperasi Merah Putih, Harapan Baru Ekonomi Desa



Kementerian Koperasi dan UKM tengah menjalankan salah satu program ekonomi berskala nasional yang dinilai sebagai proyek transformasi paling ambisius dalam sejarah pembangunan ekonomi desa. Program tersebut adalah pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang menargetkan kehadiran 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan Indonesia.

BISNIS MODEL HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA EKONOMI DESA

UNIT USAHA KOPDES MERAH PUTIH	BUMDES	POKTAN, POKDAKAN, POKNAKAN, KUPS, KUB, KUBE	USAHA PERORANGAN/ SWASTA DESA	KOPERASI YANG SUDAH ADA DI DESA
GERAI SEMBAKO	Kopdes sebagai tempat Penjualan	Kopdes Sebagai Offtaker dan pemasaran Hasil Panen	• Kopdes sebagai tempat Penjualan; • Kopdes sebagai distributor/grosir.	Kopdes sebagai konsolidator produk koperasi lainya
GUDANG & ANGKUTAN TERINTEGRASI	Kopdes sebagai sarana logistik	• Kopdes sebagai Penyedia Sarana Produksi Pertanian; • Kopdes sebagai Penyedia Sarana Produksi Pertanian.	Kopdes sebagai sarana logistik	Kopdes sebagai Penyatuan logistik koperasi lainya
UNIT SIMPAN PINJAM	•	Kopdes Sebagai Lembaga Pembiayaan	Kopdes sebagai Lembaga pembiayaan	Kopdes sebagai sumber pembiayaan ke koperasi lainnya
GERAI KLINIK DESA& GERAI OBAT MURAH/APOTEK DESA	Kopdes sebagai mitra pengelola layanan kesehatan desa	Kopdes sebagai penyedia layanan kesehatan bagi petani dan keluarganya	Kopdes sebagai distributor alat kesehatan dan obat murah	Kopdes sebagai penyedia layanan kesehatan anggota koperasi

Program ini bukan sekadar kebijakan biasa, melainkan gerakan besar yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dari berbagai tingkatan, mulai dari provinsi hingga kelurahan.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, Hendra Saragih, menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Tani di sela-sela Musyawarah Nasional X Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang digelar di Jakarta, Selasa (24/6).

Menurutnya, sejak awal tahun, isu koperasi Merah Putih menjadi sorotan karena skala dan keterlibatan lintas sektor yang sangat besar. “Tidak ada satu pun program yang dikeroyok bersama-sama oleh 18 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah selain program ini. Artinya ini bukan program biasa, ini adalah misi nasional,” ujar Hendra.

Presiden Prabowo Subianto, menurut Hendra, telah menunjukkan komitmen penuh terhadap percepatan program ini. “Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) guna mengakselerasi pembentukan koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia” tambahnya.

Target yang ditetapkan tidak main-main, yaitu seluruh 80.000 koperasi harus terbentuk dan aktif paling lambat 12 Juli 2025. Hingga saat ini sudah terbentuk sekitar 65.000 koperasi yang telah mendapatkan SK pengesahan, atau sekitar 75 persen dari target. Sisanya ditargetkan rampung dan disahkan pada akhir Juni 2025.

“Pak Presiden telah menetapkan bahwa pembentukan koperasi ini bukan hanya soal jumlah, tapi tentang membangun kekuatan ekonomi dari desa. Kami dibatasi oleh waktu dan target yang jelas. Ini pekerjaan luar biasa,” lanjut Hendra.

Menurut Hendra, proses pembentukan koperasi secara kelembagaan melalui musyawarah desa sudah selesai. Saat ini yang tersisa adalah proses legalisasi badan hukum yang tengah dikebut di seluruh daerah.

Presiden Prabowo, melalui arahannya, menekankan pentingnya membangun ekonomi dari desa ke kota, bukan sebaliknya. Koperasi dipilih sebagai motor penggerak karena memiliki struktur kolektif dan berbasis komunitas. Selain untuk membuka lapangan kerja, koperasi juga diharapkan menjadi sarana pemerataan pendapatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelindung dari gejolak ekonomi global.

Tak hanya menjadi sarana distribusi, koperasi Merah Putih juga ditugaskan sebagai agregator dan akselerator pelaku UMKM desa. Koperasi akan menjadi simpul distribusi bahan pokok, hasil pertanian, serta tempat masyarakat mengakses layanan ekonomi dan sosial yang sebelumnya sulit dijangkau.

Pangkas Rantai Pasok

Salah satu masalah besar di sektor pertanian adalah panjangnya rantai pasok yang membuat harga di tingkat konsumen melambung, namun petani sebagai produsen tetap menerima harga rendah. Karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, Hendra berharap, akan menjadi solusi konkret dalam memangkas rantai distribusi.

“Produk petani tidak perlu lagi melewati lima hingga enam lapisan tengkulak. Dengan koperasi, petani bisa menjual langsung ke koperasi yang notabene milik mereka sendiri. Ini akan menaikkan harga di tingkat petani dan menurunkan harga di tingkat konsumen,” jelasnya.

Rantai distribusi yang panjang selama ini menyebabkan margin keuntungan justru dinikmati oleh perantara, bukan produsen. Dengan koperasi, struktur distribusi akan menjadi lebih efisien dan adil. Koperasi akan bertindak sebagai pembeli langsung dari petani dan sekaligus distributor ke konsumen, sehingga harga di kedua ujung rantai menjadi lebih rasional.

Selain urusan distribusi, Koperasi Desa Merah Putih juga akan menyediakan layanan terpadu. Di setiap koperasi, masyarakat akan menemukan gerai sembako seperti beras dan LPG, gerai obat murah, klinik desa, unit simpan pinjam, fasilitas pergudangan, serta kantor operasional koperasi. Konsep ini dirancang sebagai pusat ekonomi lokal yang terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh warga desa.

Menurut Hendra, banyak kelompok tani dan Poktan di berbagai daerah yang sudah aktif dan bisa langsung dimaksimalkan perannya untuk menjadi bagian dari Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah juga memberikan peluang bagi kelompok-kelompok ini untuk bertransformasi menjadi koperasi atau mitra koperasi, terutama untuk penyaluran barang-barang bersubsidi seperti pupuk dan LPG.

“Jika semua berjalan sesuai rencana, peluncuran resmi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih akan dilakukan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Setelah peluncuran, pemerintah menargetkan seluruh koperasi telah berjalan aktif dan menjalankan unit usahanya paling lambat pada 28 Oktober 2025,” tuturnya.

Menteri Koperasi dan UKM sendiri kata Hendra, menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini adalah taruhan besar bagi masa depan koperasi Indonesia. Dengan skala yang sangat besar dan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, program koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi solusi ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan dan kemajuan desa. **Herman/Yul**



Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy:

Bangkitkan Kembali Riset dan Penyuluh Pertanian

Sejarah membuktikan bahwa potensi sumberdaya alam Indonesia yang sangat besar menjadi daya tarik dunia. Namun untuk mengangkat sumberdaya alam tersebut diperlukan riset dan sumberdaya manusia (SDM) yang bisa mengelola dengan baik.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, MS dalam forum Musyawarah Nasional X Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, Senin malam (24/6) menyerukan, pentingnya revitalisasi riset dan SDM pertanian, khususnya pertanian sebagai kunci kebangkitan pertanian Indonesia agar tak lagi tertinggal dalam arus perubahan global.

"Ini waktunya kita tumbuh dan bangkitkan pertanian Indonesia!" seru Rachmat yang juga salah seorang petinggi di HKTI. Seruan itu bukan sekadar slogan, tapi sebuah refleksi panjang dari sejarah dan visi masa depan pertanian Indonesia. Bahkan menjadi sebuah panggilan untuk bangkit dari tidur panjang, dan menyusun langkah besar berbasis riset, penyuluhan, dan semangat gotong royong.

Dalam pidatonya, Rachmat mengajak seluruh pelaku pertanian untuk menengok kembali kekuatan masa lalu. Untuk itu, bagaimana bisa menghidupkan kembali lembaga penelitian yang dulu pernah menjadi kebanggaan dunia, dan menyiapkan generasi baru petani dan peneliti yang mampu menjawab tantangan zaman.

“Indonesia adalah negara pertanian. Bahkan ketika kita belum bernama Indonesia, Nusantara sudah jadi poros kekayaan dunia,” ujarnya. Bahkan ia mengingatkan bagaimana VOC, konglomerasi dagang asal Belanda itu bisa menjadi kekuatan global bukan karena kekuatan politik, melainkan karena kekayaan pertanian Nusantara yakni rempah, kopi, gula, dan hasil bumi lainnya.

"VOC bukan negara, tapi bisa menguasai negara karena dia menguasai pertanian kita. Ia punya angkatan perang, ia punya kekuasaan, semua dibangun dari kekayaan agraria kita," tegas Rachmat. ”Bisakah ini kita ulangi?” tambahnya.

Dalam konteks modern, Rachmat menyoroti kenyataan bahwa luas wilayah daratan Indonesia hanya 191 juta ha, sementara jumlah penduduk sudah menembus 280 juta jiwa. Artinya, rasio lahan per kapita Indonesia termasuk terendah di ASEAN. "Apa artinya? Kita harus hati-hati, harus cermat memilih tanaman yang kita kembangkan. Harus yang produktivitasnya tinggi dan punya nilai ekonomi besar," tegasnya.

Ia menyebut sejumlah komoditas unggulan masa kini dan masa depan, seperti kopi, kakao, rempah-rempah, sinamon (kayu manis), hingga tanaman kratom yang hanya tumbuh di Indonesia. Kakao, misalnya, kini telah mencapai harga global lebih dari Rp160 juta per ton, menjadikannya primadona baru ekspor pertanian.

Lembaga Penelitian

Berkaca dari “Dulu, lembaga penelitian terbaik dunia ada di Bogor. Tapi setelah kemerdekaan, kita seolah kehilangan arah. Gedungnya masih kokoh, tapi orang-orangnya tidak ada,” ungkapnya, mengingatkan bahwa gedung penyuluhan di Bogor pernah dibangun oleh arsitek legendaris F. Silaban, setara dengan gedung-gedung besar seperti BI atau TNI AU.

Ia menyoroti contoh nyata seperti kayu manis, yang oleh nenek moyang kita telah dimanfaatkan untuk menurunkan gula darah. Namun karena tak ada riset yang membuktikan secara ilmiah di Indonesia, justru hasil penelitian luar negeri yang dipatenkan dan dikomersialkan. “Kita punya bahan baku, mereka yang dapat nilai tambah,” ucapnya getir.

> "Ini waktunya kita tumbuh dan bangkitkan pertanian Indonesia!"
>
> **Prof. Rachmat Pambudy,**
> *Kepala Bappenas RI, Petinggi HKTI.*

Tak hanya riset, Rachmat juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan bioteknologi canggih. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah memulai embrio transfer sapi di Cipelang sejak tahun 1995, bahkan menghasilkan “sapi kembar 50”.

Kini, Indonesia harus melangkah lebih jauh dengan teknologi seperti CRISPR, guna menghasilkan bibit unggul dari tahap embrio. “Kalau dulu kita bisa membangun Repelita tanpa apa-apa, sekarang kita punya fondasi, tinggal semangatnya yang harus dikobarkan lagi,” katanya.

Tantangan Kian Besar

Rachmat melihat tantangan pertanian ke depan sangat besar. Misalnya, luas lahan pertanian tidak bertambah, bahkan mungkin berkurang. Bukan hanya itu, Indonesia akan mengalami dampak konflik di berbagai negara dunia. ”Salah satu persoalan yang paling sulit diatasi adalah perubahan iklim yang menyebabkan global warming,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan suhu satu derajat akan menaikkan muka air laut. Artinya, sebagian lahan-lahan pertanian yang berada di pantai-pantai atau pesisir bisa terancam tenggelam, dampaknya lagi akan mengurangi produksi dan produktivitas berbagai tanaman. ”Setiap kenaikan suhu muka bumi juga akan menimbulkan penyakit baru,” katanya.

Karena itu, Indonesia harus mempersiapkan dengan baik dalam menghadapi tantangan pertanian yang semakin besar. Misalnya, bagaimana menyiapkan varietas padi yang tahan panas, padi untuk lahan payau atau lahan air asin.

Saat Munas HKTI X, Rachmat menyampaikan satu titipan khusus kepada Menteri Pertanian dan HKTI untuk membangkitkan kembali lembaga penelitian, perkuat penyuluhan, siapkan fasilitas, dan kembalikan semangat seperti era awal pembangunan dulu.

”Saya titip satu saja lembaga penelitian kita hidupkan. Apa yang harus kita teliti dan bagaimana kita harus meneliti supaya Indonesia bangkit kembali. Presiden juga sudah berjanji akan menarik lembaga penelitian pertanian kembali,” tegasnya.

Jadi bagaimana pertanian Indonesia bangkit? ”Pertama-tama kita harus benahi lembaga penelitian. Kita bisa belajar dari pemerintahan pada masa lalu, penelitian dan penyuluhan dikembangkan,” tambah Rachmat Pambudy. **Gsh/Yul**

Bisnis Matching Munas HKTI:

Aroma Wangi Bisnis Atsiri, Siapa Penikmatnya?

Minyak atsiri asal Indonesia diam-diam menjadi incaran brand parfum mewah dunia. Aroma wangi bisnis minyak atsiri di pasar global. Sayangnya peluang tersebut tidak banyak yang menyadari. Bahkan aroma tersebut lebih banyak dinikmati asing.

Siapa sangka, tanaman liar yang tumbuh di pekarangan, hutan, atau pinggir jalan di berbagai pelosok Indonesia justru menjadi komoditas primadona di pasar global. Tanaman liar seperti kembang sepatu hingga kamboja ternyata bernilai puluhan juta per liter di pasar global

Minyak atsiri atau essential oil hasil ekstraksi tanaman lokal, kini banyak diburu brand parfum mewah dunia. Bahkan, sebagian besar aroma khas dalam parfum mahal seperti CREED, diketahui bersumber dari tanaman-tanaman Indonesia.

Fakta mengejutkan ini diungkap Dr. Amelia Masniari, M.Sc., dari The Great Saga Vedic School, dalam forum business matching yang digelar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada Kamis, (26/6). Di hadapan petani dan pelaku UMKM agribisnis, Amelia membuka peluang emas yang selama ini tak banyak disadari. Ternyata, minyak atsiri Indonesia sudah menguasai dunia, tapi nilai tambahnya justru dinikmati negara lain.

Banyak tanaman yang dianggap "sepele", ternyata punya nilai ekonomis fantastis di luar negeri. Salah satunya kembang sepatu, tanaman hias yang kini makin jarang ditemukan di perkotaan. "Minyak atsirinya sangat efektif mengatasi ketombe, dan di luar negeri bisa dijual hingga Rp3 juta per liter, meski untuk memproduksinya butuh setengah ton bunga segar," ujarnya.

Contoh lain adalah bunga kamboja yang banyak berserakan di tanah Bali. Masyarakat kerap mengabaikan bunga tersebut, tapi di pasar global minyak atsiri bunga kamboja per liternya bisa dihargai hingga 3.000 dollar AS atau setara Rp 48 juta. "Padahal bunga itu cuma jatuh dan membusuk di jalanan," kata Amelia.

Menariknya, bisnis minyak atsiri terbukti tidak hanya bernilai tinggi, tapi juga stabil dan anti-krisis. Misalnya, saat nilai tukar dollar AS naik dari Rp 15 ribu ke Rp 17 ribu tahun lalu, harga minyak atsiri juga ikut terangkat hingga 50 persen. "Jadi kalau Anda bisnis di bidang ini, pendapatannya setara dengan dolar," ujarnya.

Peluang bisnis minyak atsiri juga terbuka lebar. Setiap tahun, Amelia mengungkapkan, harga minyak atsiri di pasar global naik minimal 20 persen, sehingga menjadi salah satu peluang usaha paling menjanjikan bagi petani dan UMKM. "Minyak atsiri itu tidak butuh subsidi. Pasarnya tumbuh sendiri karena permintaan dunia sangat tinggi," katanya.

Untuk memanfaatkan potensi luar biasa ini, Amelia mendorong adanya sinergi antara petani, pelaku usaha kecil, pemerintah, dan investor. Karenanya, perlunya pelatihan rutin yang menyasar teknik penyulingan modern, pengemasan, sertifikasi ekspor, dan strategi branding produk.

Sekolah yang Amelia pimpin, The Great Saga Vedic School, sudah mulai menggelar pelatihan pembuatan parfum, hair oil, hingga lotion alami berbasis minyak atsiri. Ke depan, ia berharap pelatihan ini bisa menjangkau lebih banyak desa penghasil tanaman aromatik di Indonesia. "Kita butuh intervensi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, bahkan investor luar negeri," katanya.

Amelia pun menekankan pentingnya perubahan paradigma. Indonesia tak boleh puas hanya menjadi penyedia bahan mentah. Kini sudah waktunya petani dan pelaku UMKM naik kelas menjadi produsen akhir yang bisa ekspor langsung ke luar negeri.

"Essential oil adalah pintu gerbang masuk ke industri wellness, kosmetik, dan kesehatan dunia. Nilainya triliunan rupiah. Kita bisa jadi pemain besar, asal serius membangun ekosistemnya dari hulu ke hilir," katanya.

Dinikmati Asing

Melihat peluang bisnis minyak atsiri memang cukup menggiurkan. Bahkan Indonesia boleh bangga menjadi pemasok terbesar minyak atsiri dunia. Sayangnya, saat ini hampir semua keuntungannya justru lebih banyak dinimati perusahaan asing.

Sementara itu, Raeti, Ketua Asosiasi Biotip Indonesia sekaligus pelaku usaha dari CV Pemalang Agro Wangi mengungkapkan, hampir 99 persen minyak atsiri Indonesia diekspor, namun 90 persen dari bisnis tersebut dikuasai korporasi asing seperti Mane (Prancis), Firmenich (Swiss), Ogawa (Jepang), hingga Takasago.

"Lokal cuma pegang setengah persen. Sisanya? Dikuasai raksasa asing. Kita ekspor crude oil, mereka balik lagi jual ke kita dalam bentuk parfum mahal," tegas Raeti di hadapan forum pelaku agribisnis saat Munas HKTI di Jakarta.

Raeti mengungkapkan, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang luar biasa seperti nilam Aceh, kenanga Jawa, sereh wangi Sumatra, hingga cempaka Bali yang menjadi bahan baku parfum, kosmetik, dan produk farmasi paling mahal di dunia. Mirisnya, Indonesia hanya dijadikan gudang bahan mentah oleh raksasa aroma dunia.

"Contoh paling nyata, minyak nilam kita dikirim ke Firmenich di Swiss. Lalu balik ke Indonesia jadi parfum mahal. Kita cuma kebagian aroma, duitnya lari ke luar negeri," ujarnya. Artinya, meski volume ekspor besar, Indonesia tetap rugi dalam neraca perdagangan sektor ini. Sebab, produk atsiri yang dikirim keluar negeri masih dalam bentuk mentah (crude oil), yang nilainya jauh lebih rendah.

Sementara ketika produk jadi kembali masuk ke Indonesia dalam bentuk flavor, fragrance, atau kosmetik, harganya melonjak berkali lipat. "Jangan heran kalau neraca perdagangan kita selalu negatif. Nilainya kalah karena kita jual mentahan, lalu beli lagi barang jadi dengan harga premium," jelasnya.

Raeti mengakui pemerintah sudah mulai hadir lewat pembangunan PIMAR di Bali, serta pelatihan SDI dan pengembangan biotip. Tapi hal ini belum cukup, terutama untuk mendorong UMKM dan petani naik kelas sebagai pelaku ekspor langsung. "Kalau pemerintah mau serius kembangkan biotip, potensi penghematannya bisa Rp 12 triliun per tahun, seperti studi dari Kementerian Perindustrian," ujarnya.

Dengan lebih dari 40 jenis tanaman penghasil atsiri, Raeti optimis Indonesia sebenarnya sudah mempunyai semua modal untuk menjadi pemain utama industri parfum dan kosmetik dunia. Tapi tanpa keberanian untuk hilirisasi dan tanpa dorongan kebijakan yang tegas, semua akan tetap jadi mimpi.

"Pasar global sekarang justru nunggu kita. Yang kurang cuma kepercayaan diri dan akses ke teknologi. Investor asing bahkan siap taruh mesin di sini kalau kita siap," ujar Raeti. Karena itu, Ia berharap HKTI bisa menjadi jembatan perjuangan bagi pelaku lokal agar tidak terus tertinggal dalam rantai pasok industri global. **Gsh/Yul**



Hadir di TaniFest HKTI, **Kentang Produksi AIMS Diminati Pengunjung**





Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) X di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, pada tanggal 24 – 26 Juni 2025. Sejak resmi didirikan pada 27 April 1973, HKTI adalah organisasi petani tertua dan terbesar di Indonesia. Tema yang diusung yaitu **HKTI Mewujudkan Pertanian Modern dan Struktur Perdesaan Maju.**

Hadir pada kegiatan tersebut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Ketua Umum DPN HKTI Periode 2020 – 2025 yang juga Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, anggota DPR RI, serta sejumlah pejabat dan tokoh pertanian.

Selain forum utama MUNAS, rangkaian kegiatan juga mencakup Kongres Tani, Business Matching, serta TaniFest. Hal ini bertujuan untuk mempererat kerjasama dan jejaring bisnis untuk kemajuan pertanian Indonesia.

Pada MUNAS ini sekaligus momentum pemilihan Ketua Umum, telah terpilih Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI Periode 2025 – 2030.

Partisipasi AIMS di TaniFest

PT Agra Intan Makmur Sejahtera (AIMS), perusahaan benih kentang yang berlokasi di Garut, Jawa Barat berpartisipasi dalam TaniFest dengan menghadirkan produk kentang berkualitas, yaitu kentang segar dan olahan keripik kentang. Kentang sebagai salah satu bahan pangan bergizi kini semakin banyak diminati masyarakat. Stand AIMS pun banyak dikunjungi para peserta MUNAS dan masyarakat umum.

"Kentang yang kami hadirkan di TaniFest ini adalah hasil dari varietas Chitra, yang semakin diminati oleh petani kentang untuk dibudidayakan. Varietas ini adalah kentang industri yang banyak ditanam di Garut, Pangalengan di Jawa Barat, Pemalang di Jawa Tengah, Sembalun di Nusa Tenggara Barat, dan masih banyak lagi. Potensi hasil sangat tinggi mencapai 27 ton/ha," kata Benediktus Tommy, Direktur Utama PT AIMS.

Kentang industri bernilai ekonomi tinggi sebab diminati oleh produsen makanan ringan berskala internasional seperti Indofood, Calbee Wings Food, dan PepsiCo Selain kentang industri, AIMS juga mengembangkan benih kentang Granola untuk sayur dan konsumsi masyarakat sehari-hari.

"Kami berkomitmen untuk menghasilkan benih kentang yang unggul, berkualitas, bersertifikat untuk kesejahteraan petani kentang di Indonesia. Terima kasih atas kehadiran para pengunjung TaniFest, dan semoga HKTI tetap menjadi pemersatu petani, serta mendukung program pemerintah yaitu swasembada pangan berkelanjutan," kata Tommy.■



Tambah Ilmu P4S, **PPVTPP Gelar *Coaching Clinic* Pupuk Organik**

Pemerintah saat ini mendorong petani menggunakan pupuk organik untuk mengembalikan kesuburan dan kesehatan tanah pertanian. Bahkan kini banyak petani atau kelompok tani yang membuat pupuk organik dan hayati.



Namun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai sarana budidaya pertanian, setiap orang atau pelaku usaha yang mengedarkan atau memperjualbelikan produk pupuknya harus terdaftar dan lulus uji mutu dan lulus uji efektivitas.

Untuk membantu pelaku usaha, khususnya Pengelola P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesan Swadaya) dalam membuat pupuk organik, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian (PVTPP) menggelar *coaching clinic* pupuk organik. Kegiatan berlangsung di Balai Besa Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Rabu (18/6).

Saat arahan, Kepala Pusat PVTPP, Leli Nuryati mengatakan, Pusat PVTPP memiliki fungsi, selain untuk perlindungan PVT juga mempunyai tanggung jawab dalam perijinan pertanian, salah satunya layanan perijinan pupuk. Saat ini semua layanan di Pusat PVTPP sudah terintegrasi secara online melalui OSS.

"Jadi bagi yang mau mendaftarkan perijinan produk pupuk tidak perlu lagi Jakarta, bisa melalui online, Tapi kalau ingin konsultasi langsung bisa datang ke Kantor Padu Satu PPVTPP," ujarnya.

Bagi pelaku usaha atau pengelola P4S yang ingin mengetahui prosesnya, pihaknya mengadakan *coaching clinic* untuk produsen pupuk organik. Kegiatan ini rencananya akan berlangsung di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. "Kami memberikan kesempatan *coaching clinic* langsung untuk kemudian informasi bagi P4S, salah satunya di Jawa Barat," ujarnya.

Karena itu, Leli berharap, pengelola P4S untuk memanfaatkan *coaching clinic* ini untuk bertanya mengenai semua hal yang kurang atau tidak dimengerti. "Saya sering mendapatkan masukan dan informasi baik langsung maupun tidak langsung mengenai prosedur, tata cara dan layanan pendaftaran perijinan pupuk," katanya.

Leli mengungkapkan, selama ini yang menjadi masalah terhadap produk pupuk organik adalah masalah pengujian mutu, efektifitas dan SNI. Karena itu, PPVTPP memberikan pendampingan dalam pendaftaran pupuk organik untuk P4S. "Pupuk organik yang akan dikomersialkan dan diedarkan harus terdaftar di Kementerian Pertanian," tegasnya.

Ketua Kelompok Pelayanan Perijinan dan Investasi Pertanian PPVTP, Dwi Herteddy berharap dengan adanya *coaching clinic* pengelola P4S bisa mengetahui aturan dalam perijinan produk organik yang mereka buat. Hal penting yang mereka wajib ketahui adalah sebelum mengedarkan produknya secara komersial, harus mempunyai ijin edar dan uji efektifitas terlebih dahulu.

"Dengan mereka memiliki ijin edar, usahanya memiliki legalitas dan bisa berkembang lebih baik, serta tidak bermasalah dengan aspek hukum," katanya. Karena itu, lanjut Dwi, penting bagi pemerintah memberikan pendampingan kepada UMKM, termasuk P4S, agar memahami regulasi.

Kepala BBPP Lembang, Ajat Jatnika mengingatkan, sebagai petani inovator, pengelola P4S adanya telah mampu memproduksi pupuk, baik pupuk organik padat maupun cair. Namun jika produknya sudah dikomersialkan, maka harus didaftarkan ke pemerintah.

Dengan terdaftarnya pupuk organik menurut Ajat, akan memberikan jaminan kepada konsumen, khususnya petani, agar tidak merugikan. Apalagi jika produksinya memasukan organisme yang dapat merusak ekologi dan ekosistem.**Humas PPVTPP/Yul**

Brigade Pangan Sajau **Rasakan Gaji Dua Digit**

Info Puslatan



Berbekal alsintan bantuan pemerintah, Brigade Pangan Sajau Sejahtera di Kalimantan Utara berhasil naik kelas. Tak cuma panen lancar, omset pun melonjak, anggota bahkan bisa kantongi gaji dua digit.

Di tengah bentang sawah Desa Sajau Hilir, Kalimantan Utara, sekelompok anak muda desa perlahan menenun perubahan. Mereka tergabung dalam Brigade Pangan (BP) Sajau Sejahtera tak hanya sibuk menanam padi, tapi juga mengelola alat pertanian modern layaknya usaha profesional.

Kelompok ini beranggotakan 15 orang, dua di antaranya perempuan yang dipercaya mengatur urusan umum dan keuangan. "Kami sengaja melibatkan perempuan dalam pengelolaan internal, supaya manajemen lebih rapi dan transparan. Yang di lapangan, laki-laki bisa fokus kerja teknis," kata Sulfadli, Manajer BP Sajau Sejahtera.

Saat ini, BP Sajau Sejahtera tengah bersiap memasuki musim tanam kedua. Lahan seluas 154 ha yang dikelola sudah selesai dipanen. Hasilnya telah diserap Bulog. Di balik keberhasilan itu, ada satu hal yang jadi kunci: pemanfaatan alsintan secara maksimal.

Berbekal bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian, dua unit hand tractor, satu unit TR4, satu rotavator, dan satu transplanter, BP Sajau Sejahtera tak hanya menggunakan untuk kebutuhan sendiri, tapi juga membuka layanan sewa bagi petani di sekitar. Hasilnya cukup mengejutkan. "Omset penyewaan alsintan bisa tembus Rp10 juta per minggu. Lumayan untuk tambahan pendapatan anggota," ujar Sulfadli.

Pendapatan tambahan ini turut mendorong semangat anggota kelompok. Beberapa dari mereka kini bisa merasakan gaji bulanan dua digit, sesuatu yang dulu terasa jauh dari bayangan petani kecil di desa.

Kini, salah satu alat, rotavator sedang digunakan untuk pengolahan lahan menjelang tanam kedua. Proses kerja lebih cepat, tenaga lebih efisien, dan hasil olahan tanah lebih baik. Inilah modernisasi pertanian yang mulai dirasakan dampaknya di desa.

Namun, BP Sajau Sejahtera tak ingin berhenti. Ke depan, mereka berencana melangkah ke tahap hilirisasi. "Kami ingin punya produk beras kemasan sendiri, dengan merek Sajo Sejahtera. Jadi, tidak hanya menjual gabah, tapi juga punya nilai tambah," ujarnya.

Perjalanan mereka tak lepas dari pendampingan dan pelatihan intensif dari Kementerian Pertanian. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Kapuslatan), Inneke Kusumawaty mengatakan, Brigade Pangan seperti BP Sajau Sejahtera akan menjadi ujung tombak pertanian modern. "Mereka kami siapkan agar bisa mengelola pertanian secara profesional dan berkelanjutan," ujarnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menambahkan, kehadiran BP juga penting untuk meningkatkan indeks pertanaman. "Kami terus mendorong peran penyuluh agar inovasi pertanian bisa diterima dan dipraktikkan oleh petani," tuturnya.

Adapun tujuan besar dari pembentukan Brigade Pangan adalah memastikan ketersediaan pangan di daerah, melalui teknologi, edukasi, dan penguatan komunitas. Petani tak hanya diajak menanam, tapi juga diberdayakan secara ekonomi dan dipersiapkan untuk menghadapi pasar.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mencapai swasembada pangan. Petani milenial yang tergabung dalam BP dilatih agar punya pengetahuan, keterampilan, dan mental pebisnis. Diantaranya, pelatihan manajemen usaha tani, penggunaan alsintan, hingga pengolahan pascapanen. "Tujuannya jelas, membentuk petani mandiri yang siap membawa Indonesia ke arah ketahanan pangan yang kuat.

Puslatan BPPSDMP

Optimalisasi **Balai Penyuluhan Pertanian**

Oleh : **Dr. Pawisari, S.P., M.M.**
(DPP Wanita Tani HKTI)

Pemerintah menetapkan swasembada sebagai prioritas utama pembangunan. Berbagai program kegiatan dan regulasi untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan. Dukungan regulasi antara lain Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan catatan pada Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro APBN 2026 di Rapat Paripurna DPR tentang Penguatan Peran Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Dalam mewujudkan target pemerintah, perlu penguatan sistem secara keseluruhan dan ekosistem yang saling mendukung terwujudnya swasembada pangan. Penguatan koperasi melalui koperasi merah putih dan penguatan peran Bulog perlu diikuti dengan penguatan kelembagaan Kementerian Pertanian agar saling bersinergi untuk menciptakan ekosistem yang kuat.

Kementerian pertanian memegang peranan yang penting untuk terwujudnya swasembada pangan guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Selain itu berpotensi meningkatkan pendapatan negara melalui kegiatan ekspor sehingga kementerian pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dimasa kini dan dimasa mendatang. Oleh sebab itu penguatan kelembagaan kementerian pertanian menjadi hal yang sangat penting

Transformasi kementerian pertanian dapat diawali dari pemikiran untuk menciptakan posisi tawar agar dapat memperoleh SDM yang handal dan lulusan terbaik dari perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi pada program studi pertanian. Fenomena yang terjadi saat ini banyak lulusan sarjana pertanian yang terbaik dari perguruan tinggi/Institut ternama namun tidak berkenan bekerja dibidang pertanian. Karena itu, transformasi kementerian pertanian diharapkan dapat menarik minat talenta talenta pertanian untuk berkarir dibidang pertanian.

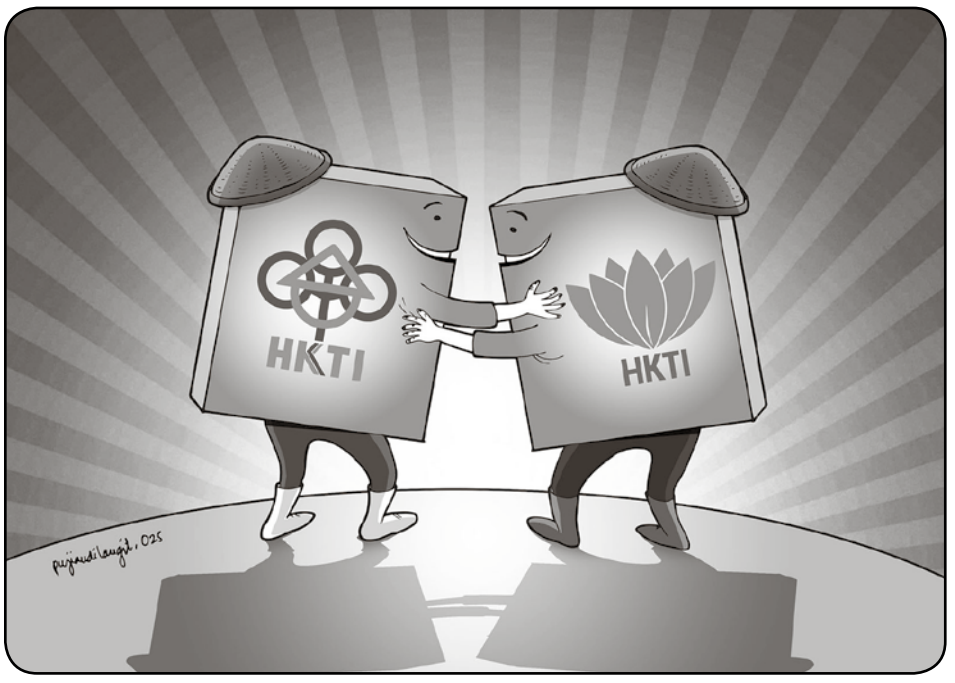
Perubahan struktur organisasi, sistem penilaian kinerja, sistem remunerasi, reward-punishment dan lainnya dapat menjadi fokus transformasi. Transformasi kelembagaan pemerintah yang telah berhasil dilaksanakan adalah kementerian keuangan sehingga dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan transformasi. Namun tantangan yang dihadapi adalah agenda transformasi harus dapat mendukung dan sejalan dengan agenda swasembada pangan. Selain itu sistem desentralisasi dari otonomi daerah menjadi tantangan kementerian pertanian, berbeda dengan kementerian keuangan yang merupakan lembaga pemerintah yang dikecualikan dan bersifat sentralistrik.

Struktur organisasi dengan garis koordinasi vertikal dari pusat sampai daerah diyakini lebih lincah dibanding koordinasi tidak langsung. Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan melalui optimalisasi peran penyuluh, dengan diterbitkannya inpres No.3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dan mengalihkan penyuluh pertanian ASN pada pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota kepada kementerian pertanian.

Apakah dengan cara yang sama dapat dilakukan pula untuk direktorat direktorat lainnya dengan pertimbangan dalam rangka optimalisasi. Apakah kondisi ini dapat terjadi sebaliknya 1 (satu) direktorat/Badan masih dalam garis koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sedangkan Direktorat Direktorat lainnya dalam koordinasi langsung dengan Kementerian Pertanian. Bagaimana dengan harmonisasi kebijakan dengan pemerintah daerah.

Apakah lebih efektif apabila Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada ditingkat kecamatan berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang menyediakan input pertanian terutama benih, bibit tanaman dan melakukan pendampingan tanam secara terus menerus. BLU dapat menjadi mitra bagi Koperasi Desa MP untuk menyediakan barang/jasa bagi Koperasi Desa MP dan menjadi pasar tetap bagi BLU. Selain itu BLU dapat menyerap tenaga kerja pertanian atau tenaga muda/talenta yang berminat terhadap pertanian dengan pengelolaan komersil. Apakah hal yang sama dapat dilakukan pada direktorat direktorat lainnya yang berpotensi untuk pengembangan sebagai Badan Layanan Umum.

Perlu kajian yang lebih menyeluruh untuk dapat memastikan arah kebijakan yang tepat terhadap perubahan fungsi fungsi organisasi. Kajian dapat dilakukan oleh konsultan yang kompeten baik dari dalam negeri maupun luar negeri.



HKP dan HKTI

Kolom



Oleh: **Memed Gunawan**

Bagi dunia pertanian, tanggal 21 Juni mempunyai makna besar. Tanggal tersebut pemerintah telah menetapkan sebagai Hari Krida Pertanian (HKP). Biasanya peringatan Hari Krida Pertanian dirayakan masyarakat pertanian di Indonesia, termasuk petani, peternak, nelayan, hingga pegawai dan pengusaha yang bekerja di sektor pertanian.

Hari Krida Pertanian juga dirayakan sebagai bentuk rasa syukur para masyarakat pertanian atas hasil panen. Pada hakekatnya, Hari Krida Pertanian merupakan hari bersyukur, hari berbangga hati dan sekaligus hari mawas diri serta hari dharma bhakti. Bukan hanya itu, saat itu menjadi waktu untuk mengevaluasi kekurangan dari kegiatan pertanian yang sudah lalu untuk diatasi dan dicegah pada kegiatan pertanian selanjutnya.

Apa yang mendasari tanggal 21 Juni ditetapkan Hari Krida Pertanian? Ternyata penetapan berdasarkan faktor astronomi dan pembagian musim Pranata Mangsa. Dari sisi astronomis, tanggal tersebut merupakan waktu saat Indonesia mengalami pergantian iklim yang mempengaruhi kegiatan pertanian.

Pada tanggal ini, matahari berada pada garis Balik Utara atau berada dalam posisi garis balik utara (23,5° lintang utara). Waktu tersebut menandai waktu proses produksi tanaman berakhir dan akan dimulainya proses penanaman yang baru. Berdasarkan Pranata Mangsa, tanggal 21 Juni juga dianggap sebagai permulaan musim yang baik untuk penanaman kembali.

Sementara berdasarkan pembagian musim, tanggal 21 Juni merupakan awal musim ke-1 yang merupakan awal dari siklus 12 musim. Siklus 12 musim yang dimaksud adalah siklus pranata mangsa, yang jika diuraikan menjadi hujan, angin, serangga, penyakit unggas, dan lain sebagainya.

Tanggal 21 Juni disebut sebagai Mangsa Terang yang diartikan sebagai langit cerah. Mangsa Terang berlangsung selama 82 hari dan terletak diantara Mangsa Panen dengan Mangsa Paceklik. Beberapa komoditi pertanian yang dilaksanakan pada masa ini antara lain kopi, cengkeh, dan lada.

Pada Juni ini juga terjadi peristiwa yang cukup besar dan patut disyukuri bagi dunia pertanian. Salah satu organisasi petani yakni Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang sebelumnya terbelah dua, antara kubu Fadli Zon dan Moeldoko, kini kembali bersatu kembali.

Saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI masing-masing kubu tersebut, memilih Sudaryono sebagai Ketua DPN HKTI. Semoga saja, nama yang tertera dalam nama HKTI yakni 'Kerukunan Tani' benar-benar terjadi di lapangan. Tak ada lagi perpecahan, karena pekerjaan rumah dunia pertanian masih sangat banyak.

Bersatu kembali HKTI dan Peringatan Hari Krida Pertanian menjadi momentum pelaku usaha pertanian, khususnya HKTI bersyukur, mengevaluasi kekurangan dan berkaca kembali. Seberapa besar HKTI telah berkontribusi terhadap pembangunan pertanian di Indonesia.■

MAXXI AGRICULTURE MACHINERY CO.
maxxi tani
MAXXI AGRI

Selamat & Sukses :

Atas Terpilihnya :

SUDARYONO B.Eng., M.M., MBA

Sebagai Ketua Umum DPN
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
Periode 2025 - 2030

HKTI

Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Teknologi dan Modernisasi Pertanian



corin

PT CORIN MULIA GEMILANG

Office : G Walk Shop Houses A1 No. 02 Citraland - Surabaya | Telp. 031-7421270, Fax. 031-7421272
Warehouse/Factory : Jl. Bakung Temenggungan KM. 1 Balongbendo - Sidoarjo | Telp. 031-99894222, Fax. 031-99894555
www.maxxi.co.id | halo@maxxi.co.id

Mau jadi Mitra Program MBG? Ini Alur Pendaftarannya

Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung Pusung, beberkan tahapan jadi Mitra MBG dari akses portal hingga verifikasi fisik lokasi SPPG.



Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas jangkauannya. Untuk mendukung pelaksanaan program ini di seluruh wilayah Indonesia, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang kerja sama bagi berbagai pihak, mulai dari Yayasan, PT, CV, UD, UMKM, hingga koperasi untuk menjadi Mitra maupun penyedia lokasi Satuan Penyedia Program Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, menegaskan bahwa MBG bukan hanya program gizi biasa.

"Ini adalah misi kebangsaan. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi dengan masyarakat sipil dan pelaku usaha agar MBG benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan," ujarnya.

Untuk itu, BGN telah menyiapkan sistem pendaftaran mitra berbasis daring yang dirancang ringkas, transparan, dan akuntabel.

Berikut adalah alur lengkap yang perlu diketahui oleh calon Mitra dan penyedia lokasi SPPG:

1. Akses Website Portal Mitra BGN

Langkah pertama adalah mengunjungi portal resmi BGN di mitra.bgn.go.id.

Di laman ini, calon mitra bisa langsung membuat akun baru dan memulai pendaftaran.

"Siapa pun yang memiliki badan hukum yang sah, seperti Yayasan, PT, CV, UD, maupun UMKM, bisa menjadi bagian dari program ini," jelas Lodewyk.

2. Lengkapi Formulir Pendaftaran

Setelah berhasil membuat akun, calon mitra akan diminta untuk mengisi formulir digital.

Data yang perlu dilengkapi meliputi:

- Nama badan hukum
- Alamat resmi
- Kontak penanggung jawab
- Kata sandi

Lodewyk menekankan pentingnya ketelitian dalam proses ini. "Pastikan data yang dimasukkan valid, karena ini akan menjadi dasar verifikasi," katanya.

3. Verifikasi Email dan Masuk ke Portal Mitra

Setelah formulir dikirim, sistem akan mengirimkan tautan verifikasi ke alamat email yang didaftarkan.

Calon mitra harus mengklik tautan tersebut untuk mengaktifkan akun, kemudian login ke dalam dashboard Portal Mitra BGN.

4. Lengkapi Data Alamat dan Penanggungjawab

Di dalam dashboard, mitra diminta mengisi alamat lengkap badan usaha serta data penanggung jawab utama.

Ini adalah langkah penting untuk memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan lancar antara mitra dan tim BGN.

5. Unggah Dokumen Legalitas dan Keuangan

Agar terdaftar secara resmi, mitra harus mengunggah dokumen legal berikut:

- Akta Pendirian Perusahaan
- SK Kemenkumham
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- NPWP

"Keabsahan legalitas sangat penting untuk memastikan pertanggungjawaban program MBG ke depan," ujar Lodewyk.

6. Ajukan Lokasi SPPG dan Lengkapi Data Sarana-Prasarana

Setelah akun mitra aktif dan dokumen lengkap, langkah berikutnya adalah mengajukan titik lokasi SPPG.

Mitra dapat memilih lokasi yang diinginkan, selama masih sesuai dengan wilayah operasional yang dijangkau MBG.

Selain lokasi, mitra juga harus mengisi data kesiapan sarana dan prasarana, mulai dari tempat masak, dapur, distribusi makanan, hingga kapasitas pelayanan harian.

7. Verifikasi Data oleh Tim BGN

Begitu semua dokumen dan data diunggah, tim dari BGN akan melakukan proses verifikasi administratif.

Mereka akan memeriksa:

- Kelengkapan formulir
- Keabsahan dokumen
- Konsistensi data

Jika semua sesuai, akun mitra akan memperoleh centang biru sebagai tanda telah lolos validasi.

8. Verifikasi Fisik Lokasi SPPG

Setelah tahap administratif, giliran tim lapangan BGN turun tangan. Mereka akan memverifikasi kesiapan fisiklokasi SPPG, mencakup:

- Infrastruktur dapur
- Peralatan masak
- Sistem distribusi makanan
- Kelayakan tempat untuk operasional

"Verifikasi fisik ini penting karena makanan bergizi tidak bisa dikompromikan. Harus aman, bersih, dan memenuhi standar," terang Lodewyk.

9. Pendaftaran Dinyatakan Selesai

Jika seluruh tahapan di atas sudah dilalui dan disetujui, maka:

- Akun mitra dinyatakan aktif
- Lokasi SPPG disetujui
- Mitra siap menjalankan penyediaan dan penyaluran MBG

Tim BGN akan terus melakukan pendampingan dan supervisi kepada mitra aktif.

Mitra juga akan mendapat pelatihan dan dukungan logistik sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Menurut Lodewyk, digitalisasi alur pendaftaran ini menjadi salah satu upaya BGN untuk mempercepat realisasi visi nasional: pemerataan gizi anak-anak Indonesia.

"Kami tidak ingin proses panjang, birokratis, dan membingungkan. Portal Mitra BGN adalah wujud dari reformasi layanan publik yang kita usung bersama," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa dengan sistem ini, siapa pun yang memiliki niat baik dan kesiapan bisa ikut berkontribusi.

"Entah Anda pelaku UMKM, yayasan sosial, koperasi, atau lembaga pendidikan, asal punya legalitas dan komitmen, kami terbuka," tegas Lodewyk.

Untuk diketahui, Program MBG menargetkan distribusi makanan bergizi ke jutaan anak usia sekolah dasar di seluruh Indonesia.

Dengan skema kemitraan ini, BGN ingin memastikan bahwa penyedia makanan tidak hanya memenuhi kuota, tapi juga memenuhi kualitas.

"Ini bukan sekadar bagi-bagi makan siang. Ini investasi negara dalam membentuk generasi kuat dan sehat," ujar Lodewyk, mengakhiri.**Humas BGN**

Yovin Karwayu

Mimpi Besar dari Tanah Kecil Bajawa

Kopi kini bukan cuma soal rasa, ini tentang identitas, perjuangan, dan kebanggaan. Lewat Bangflo, Yovin Karwayu membuktikan bahwa kopi Flores bisa menjadi simbol perubahan sosial dan mimpi besar dari tanah kecil bernama Bajawa.



Berawal pada tahun 2017, Bangflo hadir dengan semangat milenial, membawa identitas merek yang unik, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal. Nama "Bangflo" sendiri merupakan singkatan dari "Banggain Flores" yang mencerminkan misi utamanya yaitu membangkitkan potensi daerah, terutama di sektor pertanian kopi.

Bangflo lahir dari keprihatinan Yovin terhadap kemiskinan yang membelit keluarga petani kopi di Flores. Ia melihat peluang besar bagaimana kopi bukan hanya komoditas, tapi juga jalan untuk memperbaiki nasib banyak orang.

Dengan membangun komunitas antara pembeli dan petani, Bangflo mulai memasarkan kopi Arabika Flores ke berbagai penjuru. Bangflo bekerja sama dengan 500 keluarga petani di Bajawa dan Manggarai Timur, yang mana setiap keluarga mampu menghasilkan sekitar 1 ton biji kopi per tahun.

Tak hanya membangun rantai pasok, Yovin mengatakan, Bangflo juga mendirikan fasilitas pengolahan kopi di Bajawa memberdayakan petani perempuan untuk proses pemilahan biji kopi. Hal ini untuk memastikan hanya kualitas terbaik yang dikirim ke konsumen.

Kopi andalan Bangflo datang dari Bajawa, Kabupaten Ngada. Kota kecil ini berdiri di atas tanah vulkanik yang subur hasil letusan Gunung Inerie dan sekitarnya. Dengan ketinggian 1.200–1.800 meter di atas permukaan laut, suhu yang sejuk (15–25°C), serta metode tanam tradisional tanpa bahan kimia, kopi Bajawa tumbuh dengan cita rasa khas yang sulit ditiru.

"Kopi Arabika Flores Bajawa dikenal dengan aroma tajam, rasa yang kuat, body sedang hingga pekat, tingkat keasaman menengah, dan sentuhan manis yang menyenangkan" ungkap Yovin saat ditemui pada kegiatan INSIDE (INspiring to Develop, pada kegiatan Tanifest di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta.

Tak heran jika kopi ini dihargai lebih tinggi dibanding kopi dari wilayah lain, meskipun dihasilkan dari lahan kecil milik petani sekitar 1-1,5 ha/keluarga. Kini, kopi Bangflo tak hanya diseduh di kafe-kafe lokal. "Mereka telah mengekspor green bean Arabika dan Robusta ke berbagai negara seperti Jepang, Timur Tengah, dan bahkan 20 ton Robusta ke Selandia Baru tahun ini," tutur Yovin.

Ini adalah bukti bahwa kualitas dan cerita di balik kopi bisa membuka pasar internasional. Kini fenomena global pun berubah. Negara seperti Tiongkok yang dahulu dikenal sebagai bangsa peminum teh, kini perlahan beralih ke kopi. Tren ini jadi peluang besar bagi kopi Indonesia.

Namun, di balik semua pencapaian itu, tantangan besar masih menghadang. Sebagian besar kebun kopi di Indonesia adalah milik petani kecil, dengan pohon-pohon tua yang produktivitasnya menurun. Perubahan iklim juga ikut mengancam stabilitas produksi. "Kami mendorong pemerintah untuk menciptakan varietas kopi baru agar petani bisa melakukan replanting," ujar Yovin.

Dibanding negara produsen lain seperti Vietnam, produktivitas kopi Indonesia masih jauh di bawah. Tapi Indonesia punya satu keunggulan yang tak bisa disamai yakni cita rasa. Kini, kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup generasi milenial. Lebih dari sekadar minuman, ia menjadi simbol pertemuan, kreativitas, dan identitas. Bangflo hadir bukan hanya sebagai brand kopi, tapi juga sebagai jembatan antara warisan alam Flores dan dunia. **Herman/Yul**





ROMINDO PRIMAVETCOM
selalu memberikan yang terbaik

Pilihan Lengkap Agar Ternak Sehat & Produktif

Biodin
Meningkatkan Kerja Otot & Daya Tahan Tubuh

Hematodin
Memacu Pertumbuhan & Pembentukan Sel Darah Merah

Vitadin 500
Vitamin AD3E Konsentrasi Tinggi. Untuk Penanganan & Pengobatan Defesiensi vitamin A, D3, E Serta Untuk Pertumbuhan Optimal

Ferrodin
Anti Anemia Khusus Anak Babi

Ivomec Super
Obat Anti Endoparasit & Ektoparasit Paling lengkap

Dovenix
Untuk Distomatosis & Haemonciacis

Duodin-LA
Antibiotika Spektrum Luas Bersifat Long Acting

Spiradin
Antibiotika Terbaik untuk Mastitis & Pneumonia

Terrexine
Obat Mastitis (Masa Laktasi)

Marbox
Quinolon Generasi Terbaru, Broad Spektrum

Vetrimoxin-LA
Amoxicillin Bersifat Long Acting

Cevaxel RTU
Mengandung Ceftiofur Hidroclhoride 50mg (Antibiotika Generasi Ketiga Cephalosporin)

Cevazuril OS
Toltrazuril Oral Suspensi untuk Pencegahan & Pengobatan Coccidiosis

Enzaprost-T
Prostaglandin Natural

Altresyn
Oral Solution Altrenogest untuk Sinkronisasi Estrus

Pestiffa
Vaksin Aktif terhadap Penyakit Hog Cholera

Rabisin
Vaksin Inaktif Rabies untuk Carnivora & Herbivora

Circovac
Vaksin babi untuk PCV2 (Porcine CircoVirus Type 2), Yang Pertama Teregristasi untuk Induk (Sow) & Anak (Piglet)



UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT, SILAHKAN HUBUNGI:
PT. ROMINDO PRIMAVETCOM
JL. Dr. Saharjo 264 - Jakarta 12870
Telepon. (021) 8300 300

Ironi **Pasar Beras**

Pemerintah mengungkap hasil survei investigasi perberasan. Ada tiga kasus yang terjadi di lapangan yakni, harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), beras tidak sesuai mutu dan berat beras yang tidak sesuai dengan volume yang tertera dalam kemasan. Sebuah ironi perdagangan beras dalam negeri.



Akhir-akhir ini ada kecenderungan harga beras, khususnya yang medium mengalami kenaikan, meski tidak terlalu tinggi. Namun di sisi lain, secara nasional pemerintah mengungkap ada kenaikkan produksi padi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi mencapai 35,6 juta ton beras atau lebih tinggai 3,6 juta ton dari target 32 juta ton.

Dengan produksi beras yang diprediksi naik, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman melihat ada kejanggalan kenaikan harga beras tersebut. Karena itu, bersama Badan Pangan Nasional fan Satgas Pangan, Kementerian Pertanian melakukan survei investigasi kondisi perberasan di 10 provinsi, khususnya kota-kota besar.

Survei tersebut untuk mengecek mutu atau kualitas beras apakah sesuai dengan tertera dalam kemasan, berat atau volume beras sesuai atau tidak dengan yang tertera dalam kemasan, kemudian kesesuaian harga dengan HET (harga eceran tertinggi).

"Ini ada anomali, mengapa harga beras di konsumen naik, tetapi di produsen turun. Kita cek bersama ke pasar di 10 provinsi, kota besar Indonesia. Kami cek mulai mutu atau kualitas, berat timbangannya dan harganya melebihi HET atau tidak," kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Dari hasil survei investigasi terhadap 286 sampel pada 212 merek beras yang berlangsung dari 6-23 Juni 2023 menujukkan adanya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dan ketidasesuaian dengan regulasi pemerintah. Hasil temuan, beras medium yang mutunya tidak sesuai regulasi sebanyak 88,24 persen, harga beras di atas HET sebanyak 95,12 persen dan berat yang kurang dari volume yang tertera dalam kemasan sekitar 9,38 persen.

Sementara untuk beras premium, beras yang mutunya tidak sesuai regulasi sebanyak 85,56 persen, ketidaksesuaian atau di atas HET sekitar 59,78 persen dan tidak sesuai dengan berat dalam kemasan hanya 21,46 persen.

Beras yang beratnya kurang, umumnya 10 persen dari yang tertera dalam kemasan. Sedangkan untuk mengetahui kesesuaian mutu beras, pemerintah melakukan pengecekan di 13 laboratorium yang ada di seluruh Indonesia. "Pengecekan di labortaorium ini kita lakukan, karena kita tidak ingin salah dan ceroboh. Apalagi ini sangat sensitif," ujar Amran.

Rugikan Konsumen

Temuan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi konsumen, terutama terkait potensi kerugian finansial. Berdasarkan perhitungan Kementerian Pertanian, potensi kerugian yang bisa dialami konsumen beras premium diperkirakan mencapai Rp 34,21 triliun per tahun, sementara konsumen beras medium berpotensi merugi hingga Rp 65,14 triliun.

"Jadi ini potensi kerugian konsumen sekitar 99 triliun. Inilah hasil tim bersama turun ke lapangan dan kita akan verifikasi ulang, nanti satgas bergerak mengecek langsung di lapangan. Ada mutunya tidak sesuai, harganya tidak sesuai, beratnya tidak sesuai, ini sangat merugikan konsumen," ungkap Amran.

Berkaca dari hasil investigasi ini, Amran menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi beras di pasar agar konsumen tidak terus dirugikan. Produsen dan distributor beras untuk memastikan produk yang dijual sesuai dengan standar yang berlaku, baik dari sisi mutu maupun harga.

Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pangan yang beredar di pasar. Pihaknya kata Amran memberikan waktu 2 minggu bagi para produsen beras untuk melakukan penyesuaian terhadap mutu dan harga beras yang dijual sesuai dengan regulasi.

Amran meminta Satgas Pangan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI untuk mendalami terjadinya ketidaksesuaian standar mutu beras yang dijual di pasar dan melakukan penindakan terhadap produsen dan pedagang yang nakal. Dengan langkah-langkah ini, Mentan berharap pasar beras Indonesia dapat berjalan dengan lebih transparan dan adil.

Kepala Satgas Pangan Brigjen Pol. Helfi Assegaf juga menegaskan, pihaknya memberikan waktu dua pekan kepada para produsen dan pedagang untuk mengklarifikasi dan menyesuaikan mutu, serta harga produk dengan informasi yang mereka klaim dalam kemasan. "Jika tidak, Satgas Pangan akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum," tegasnya. Kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar berhati-hati dalam membeli produk beras dan memastikan kesesuaian antara label dan isi produk yang dijual ke konsumen.

Sementara itu, Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus), Andi Herman menegaskan, penegakan hukum terhadap pelanggaran perdagangan beras harus dilakukan guna memberikan efek jera dan tata kelola. "Kami memberikan kesempatan dan waktu untuk segera menghentikan perbuatan curang, untuk kemudian diperbaiki tata kelola agar harga pangan bisa terjangkau sebagaimana yang diharapkan," katanya.

Langkah tegas ini diambil pemerintah demi menjaga keadilan dan transparansi pasar pangan. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap produk yang dibeli dan melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian antara isi dan label kemasan. **Yul**

Ketua Umum Perpadi: **'Kami Advokasi ke Anggota'**



Bagaimana dengan kalangan pengusaha beras dan penggilingan padi? Ketua Umum Perhimpunan Pedagang Beras dan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso mengatakan, perlu diketahui pelaku bisnis beras cukup banyak dari mulai produsen hingga ke konsumen. Namun perlu diekathui tidak semua pengusaha beras dan penggilingan padi anggota Perpadi.

Pihaknya, kata mantan Dirut Perum Bulog ini, pihaknya telah melakukan advokasi dan meminta anggota Perpadi mengikuti peraturan yang berlaku. Jika ada hal yang menghambat dalam berusaha, maka pihaknya akan membantu memperjuangkan.

"Hingga kini kami belum tahu secara detail dimana dan pelakunya siapa. Tapi kami sudah koordinasi dengan anggota. Kami minta anggota jangan berbuat yang merugikan konsumen dan produsen gabah petani," katanya. **Yul**



Komersialisasi E-PAPER Sinartani

Tabloid Sinartani | Tabloid sinartani.com | SINTA TV

E-paper Sinartani sudah berjalan selama 2 tahun dan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Sinartani versi cetak. E-paper Sinartani terbit tiap minggu, 48 kali setahun, terdiri dari 20-24 halaman sekali terbit. Informasinya mencakup issue-issue yang lebih melebar, selain pertanian juga mencakup informasi umum dan humaniora.

Sampai saat ini e-Paper Sinartani masih didistribusikan secara gratis ke semua penyuluh. Kini, waktunya E-Paper yang sudah dikenal oleh penyuluh dan petani itu mulai dijual secara komersil dengan harga yang teramat murah, yaitu Rp 1.500/edisi atau Rp 72.000/tahun.

Mudah-mudahan upaya ini merupakan sinergi yang baik antara pembaca dengan penerbit Sinartani yang tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas Sinartani agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Para pembaca yang ingin berlangganan dipersilahkan mengirimkan nama dan nomor HP-nya, melalui WhatsApp ke Sdr Wawan (081216304232) serta mentransfer biaya tahunan sebesar Rp 72.000 ke Rekening Sinartani: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413



BERLANGGANAN

E-paper Tabloid Sinartani

Hanya dengan

Rp. 72.000 / Tahun

HUBUNGI :

0813 1757 5066

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS

www.tabloidsinartani.com | tabloidsinartani.com | tabloidsinartani.com | @SinarTaniST | tabloidsinartani | SINTA TV



Hari Krida Pertanian

Momentum Tranformasi Penyuluh Pertanian

Hari Krida Pertanian yang diperingati setiap 21 Juni menjadi bentuk ungkapan rasa syukur bagi insan pertanian. Peringatan Hari Krida 2025 yang digelar di Kementerian Pertanian pada Senin (23/6) menjadi momentum transformasi penyuluh pertanian.



Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2025, Pemerintah mengalihkan status ASN penyuluh dari pemerintah daerah ke pusat. Bagi Darma Irawan, penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, peringatan Hari Krida Pertanian ke 53 menekankan pentingnya transformasi penyuluh agar tetap relevan dan berdampak.

Dengan ditariknya penyuluh pertanian ke pusat, menurutnya, penyuluh pertanian harus aktif mendukung langkah-langkah strategis pemerintah, utamanya Kementerian Pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Penyuluh tidak hanya sebagai pendamping petani, tetapi juga sebagai agen perubahan di lapangan.

"Harapan kami, penyuluh harus bertransformasi menjadi penyuluh yang sesuai dengan keadaan sekarang. Karena kami adalah ujung tombak untuk mewujudkan swasembada pangan, cita-cita besar Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto," ujar Dharma.

Dharma juga mengapresiasi program Kementan seperti optimasi lahan dan Brigade Pangan yang telah berjalan sejak 2024. Program ini, menurutnya, sangat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

"Tahun ini sudah mulai musim tanam kedua dan bahkan bersiap ke musim tanam ketiga. Petani yang tergabung dalam Brigade Pangan sudah mulai panen dan ada yang meraih penghasilan bersih hingga Rp 60 juta, bahkan kotor lebih dari Rp 100 juta per musim tanam," tutur Dharma yang hadir pada Puncak Peringatan Hari Krida Pertanian di Kementerian Pertanian.

Abbah Attamimi, PPL Kalimantan Tengah mengatakan, semangat para penyuluh pada peringatan Krida ke 53 ini menjadi refleksi nyata bahwa transformasi sektor pertanian tidak hanya bertumpu pada kebijakan pusat, tetapi juga pada daya juang di lapangan. Dengan sinergi dan kolaborasi, swasembada pangan bukanlah cita-cita semata, melainkan target nyata yang sedang digerakkan bersama.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi dedikasi para penyuluh dan Babinsa yang terus mendampingi petani di lapangan. Ia menegaskan, HKP tahun ini menjadi momentum penguatan peran penyuluh sebagai pengawas langsung program pertanian dari proses tanam, distribusi pupuk dan alsintan, hingga adopsi benih unggul dan teknologi pertanian modern.

"PPL dan Babinsa adalah mata dan telinga Pak Presiden untuk mengawasi pertanian. Semua penyimpangan di lapangan harap segera dilaporkan. Kalau ada harga pupuk di atas HET, laporkan, pasti kita tindak," tegas Amran.

Mengusung tema "Transformasi Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Nasional", peringatan HKP ke-53 ini dihadiri berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah, penyuluh pertanian, gapoktan, Brigade Pangan, TNI/Polri, akademisi, mahasiswa, dan mitra pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi kepada PPL yang berprestasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan secara simbolis 10 unit sepeda motor kepada penyuluh terbaik. Penghargaan diberikan berdasarkan indikator kinerja seperti pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT), pengawalan harga gabah dan jagung, serta keterlibatan dalam program Brigade Pangan.

Kementerian Pertanian juga meluncurkan dua inisiatif strategis yang didampingi langsung oleh penyuluh. Pertama, penetapan 1.000 gapoktan sebagai titik serah pupuk bersubsidi. Kedua, penguatan Brigade Pangan dan Koperasi Pertanian Modern sebagai penyalur BBM Alsintan.

Puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 Tahun 2025 menjadi momentum penting pengakuan terhadap peran strategis Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam menopang transformasi sektor pertanian dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Tarik ke Pusat

Hingga kini pemerintah telah menarik 34 ribu dari 38 ribu penyuluh pertanian yang di daerah ke pusat. Meski status berubah, para penyuluh tetap bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah masing-masing.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menyatakan, penguatan peran penyuluh merupakan bagian dari langkah serius pemerintah dalam mereformasi sistem penyuluhan. "Selama masa transisi ini, seluruh proses sedang kita siapkan. Mulai tahun 2026, seluruh penyuluh resmi menjadi pegawai pusat. Dengan status ini, penyuluh dapat diberdayakan lebih optimal untuk mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan," ujarnya.

Penarikan ini bersifat mandatori, yang berarti otomatis menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski status berubah, para penyuluh tetap bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah masing-masing.

"Percepatan swasembada pangan juga harus diiringi peningkatan produktivitas petani. Penyuluh berperan penting dalam mendampingi petani meningkatkan indeks pertanaman, penggunaan varietas unggul, dan penerapan teknologi pertanian modern," tambahnya.

Idha Widi menjelaskan, saat ini Brigade Pangan telah menjadi motor transformasi pertanian di berbagai wilayah. Sejak awal 2025, brigade telah menerima bantuan alsintan dan pelatihan intensif. Banyak diantaranya kini telah mampu mengelola lahan dan mengoperasikan alat mesin pertanian secara mandiri.

"Brigade Pangan adalah titik balik transformasi pertanian dari tradisional menjadi modern. Mereka dibekali teknologi, benih unggul, dan pelatihan pengelolaan usaha tani. Tapi bantuan dari pemerintah hanya diberikan sekali, selanjutnya Brigade Pangan harus mandiri dan mampu menyusun rencana usaha sendiri," tegasnya. **Yul**

Hadi Irpandi
Penangkar Benih Andalan dari Pasaman

Di tengah keterbatasan benih unggul di Pasaman, Hadi Irpandi hadir membawa solusi. Lewat tangan dinginnya, lahan satu hektare berubah jadi sumber benih berkualitas bagi petani sekitarnya.



Di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, ada seorang pemuda yang tak memilih merantau ke kota setelah lulus kuliah. Ia justru kembali ke kampung, memilih sawah sebagai ladangnya berinovasi. Namanya Hadi Irpandi yang baru berusia 28 tahun, petani milenial yang kini dikenal sebagai penangkar benih padi bersertifikat di Kabupaten Pasaman.

Lulusan Agroteknologi Universitas Taman Siswa Padang ini mulai menekuni penangkaran benih sejak tahun 2019. Keputusan itu diambil bukan tanpa alasan. Hadi melihat, setiap kali musim tanam tiba, banyak petani di kampungnya kesulitan mendapatkan benih unggul. Yang tersedia kebanyakan benih asal-asalan, tidak jelas kualitas dan asal-usulnya.

"Padahal Pasaman ini daerah pertanian. Tapi ironisnya, benih unggul malah susah didapat. Itu yang mendorong saya untuk mulai usaha penangkaran," kata Hadi saat ditemui di lahan miliknya.

Dengan ilmu yang ia pelajari semasa kuliah, Hadi mulai merintis usaha penangkaran benih. Ia menggandeng UPTD BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih) Provinsi Sumatera Barat untuk mendampingi proses dari awal tanam hingga panen. Setelah melalui serangkaian pengujian, akhirnya pada 22 Februari 2022, benih hasil produksinya resmi bersertifikat dan diberi label Multi Jaya.

"Sejak ada sertifikasi itu, saya mulai memasarkan benih ke petani sekitar. Jenisnya macam-macam, seperti Cisokan, Serang, dan Inpari 32," jelasnya.

Lahan penangkaran yang digarap Hadi seluas satu hektare, dengan produksi sekitar 3 ton benih padi per tahun. Dari situ, ia bisa memperoleh penghasilan sekitar Rp12 juta per ton. Namun bagi Hadi, yang terpenting bukan hanya soal omzet, tapi bagaimana usaha ini bisa menjawab kebutuhan petani dan membuka peluang baru di sektor pertanian.

Tak hanya benih padi, Hadi juga menjual aneka bibit lain seperti kopi, cabai, kakao, dan sayuran. Semuanya ditujukan untuk memperkuat semangat bertani di kalangan muda dan mendorong pemanfaatan lahan yang selama ini belum tergarap maksimal.

"Banyak lahan di kampung yang belum digarap. Sayang kalau dibiarkan. Padahal kalau dikelola baik, hasilnya bisa menopang ekonomi keluarga," ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya menekan biaya produksi dan menjaga kesuburan tanah, Hadi juga mengembangkan pupuk organik berbahan dasar kotoran sapi dan bahan hayati lainnya. Produk tersebut ia beri nama Pupuk Kompos Golden, yang dijual seharga Rp40 ribu per karung.

"Pupuk ini saya olah sendiri, dengan campuran trikoderma dan bahan organik. Hasilnya cukup bagus untuk tanaman padi maupun hortikultura," terang Hadi.

Langkah Hadi tak berhenti di situ. Ia bersama beberapa rekannya mendirikan Kelompok Petani Milenial Pasaman, yang kini beranggotakan sekitar 15 orang. Mereka saling berbagi pengalaman, bibit, dan pengetahuan teknis untuk mengembangkan pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.

"Yang penting kami saling dukung. Biar sama-sama maju. Saya juga ingin menunjukkan ke anak-anak muda lain bahwa bertani itu bisa jadi profesi yang menjanjikan, asal ditekuni," katanya.

Ke depan, Hadi berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan nyata kepada petani muda. Baik dalam bentuk pelatihan, bantuan modal, maupun akses pemasaran.

"Kami ini butuh pendampingan yang konsisten, bukan cuma program musiman. Kalau petani muda terus dibina, saya yakin ke depan Pasaman bisa jadi lumbung benih unggul, bukan hanya untuk daerah sendiri, tapi juga provinsi," tutupnya**. Nattasya/Gsh**

Tabloid Sinar Tani
PERTANIAN INDONESIA BARU

SINTA TV

PRICE LIST
BERLANGGANAN



SINAR TANI CETAK
RP. 16.000
Per Edisi
Minimum Pembelian
Rp 64.000/BLN
Rp 768.000/THN

SINAR TANI EPAPER
Rp. 72.000/ Thn

Nama : .....
Alamat : .....
.....
Nomor Whatsapp : .....
Email : .....
Jabatan : .....
No rek : 127.0096.016.587
Bank Mandiri Cabang Ragunan A.n PT. Duta Karya Swasta

CONTACT
081280312466 - Hasan Latuconsina (Koperasi Perhiptani)
081318273349 - Rita (Koperasi Perhiptani)
081216304232 - Wawan (Sinar Tani)
085921280998 - Asrori (Sinar Tani)

sinartani.co.id tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV SINTA TV